PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 4 Tahun 2015

T E N T A N G

REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014 Cirebon kepada DPRD dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 April 2015 merupakan kewajiban Bupati;

b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014 sebagaimana termaksud pada huruf a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Panitia Khusus dan telah disepakati untuk direkomendasikan kepada Bupati yang penetapannya dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 68 Seri E.21).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2014.

PERTAMA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 27 April 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAPORAN PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN CIREBON
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON
TAHUN 2014

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM,
ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD;
HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

PERTAMA SEKALI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KITA DAPAT BERKUMPUL BERSAMA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DENGAN AGENDA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014 DALAM KEADAAN SEHAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM KITA SAMPAIKAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW BESERTA PARA KELUARGANYA, SAHABAT-SAHABATNYA DAN KEPADA PARA PENGIKUTNYA TERMASUK KITA DIDALAMNYA. AMIEN.

SEBELUM KAMI SAMPAIKAN TANGGAPAN TENTANG LKPJ BUPATI TAHUN 2014 INI, TERLEBIH DAHULU MELALUI FORUM YANG MULIA INI KAMI SAMPAIKAN INNALILLAHI WAINNALILLAHI ROJI'UN SEBAGAI UNGKAPAN BELA SUNGKAWA YANG SEDALAM-DALAMNYA ATAS

MUSIBAH LONGSORNYA GUNUNG KUDA DI DESA CUPANG KECAMATAN DUKUPUNTANG YANG MENJADI SOROTAN BERBAGAI STASIUN TELEVISI NASIONAL DAN MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KORBAN JIWA YANG HINGGA SAAT INI BELUM SELURUHNYA DITEMUKAN. DENGAN KEJADIAN INI KAMI SELURUH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON SANGAT MERASA PRIHATIN DAN MENYESAL. SEMOGA INI SEMUA DAPAT DIJADIKAN PELAJARAN BERHARGA BAGI KITA SEMUA.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PASAL 23 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH REPUBILK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 BAHWA KEPALA DAERAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA, DAN JUGA DISEBUTKAN DALAM PASAL 23 AYAT (4) DAN AYAT (5), BAHWA KEPUTUSAN DPRD TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TERSEBUT DITETAPKAN PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH LKPJ DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI PADA TANGGAL 30 MARET 2015.

DAN DALAM HAL INI DPRD MENYAMPAIKAN CATATAN-CATATAN DAN REKOMENDASI UNTUK DIPERHATIKAN OLEH SAUDARA BUPATI AGR DILAKUKAN PERBAIKAN-PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DIMASA MENDATANG KARENA DIPASTIKAN

BERDAMPAK PADA BERBAGAI PELAYANAN PUBLIK YANG OBYEKNYA ADALAH SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON. OLEH KARENA ITU, MAKA DPRD KABUPATEN CIREBON TELAH MEMBENTUK 2 (DUA) PANITIA KHUSUS YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD NOMOR 3 TAHUN 2015. DAN KEPADA KEDUA PANITIA KHUSUS ITU DIBERIKAN TUGAS DAN WEWENANG UNTUK MENELAAH, MENGKAJI DAN MENDALAMI LKPJ BUPATI TAHUN 2014 TERSEBUT.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SETELAH MENYIMAK, MENGKAJI DAN MEBGANALISA SECARA MENDALAM MELALUI FORUM-FORUM DISKUSI DENGAN PARA PAKAR YANG AHLI DIBIDANGNYA TERMASUK RAPAT-RAPAT DENGAN OPD-OPD TERKAIT, MAKA HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS I TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2014, DAPAT DISUSUN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

I. PENDAHULUAN
II. HASIL PEMBAHASAN
III. REKOMENDASI DAN CATATAN-CATATAN
IV. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBAHASAN

- NASKAH PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014 BESERTA SELURUH LAMPIRANNYA YANG DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD TANGGAL 30 MARET 2015;
- PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014 PADA RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD TANGGAL 6 APRIL 2015.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON YAITU :
  1. UNDANG-UNDANG TAHUN 1950 NOMOR 14 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA BARAT
  2. UNDANG-UNDANG NOMO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
  3. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
  4. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
  5. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

6. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
7. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
8. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
9. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
10. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
11. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERNGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT
12. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG PERANGKAT DAERAH
14. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

15. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA, PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
16. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RPJM NASIONAL TAHUN 2010 S/D TAHUN 2014
17. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
18. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG RPJMD KABUPATEN CIREBON
19. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG RPJPD KABUPATEN CIREBON
20. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG APBD TA. 2014
21. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN APBD TA. 2014
22. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANSUS LKPJ BUPATI TAHUN 2014.

B. PESERTA RAPAT

- LEGISLATIF

  BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2015 TANGGAL 6 APRIL 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2014, MAKA SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I SEBAGAI BERIKUT :

1. AAN SETYAWAN, S.Si	KETUA
2. R. CAKRA SUSENO, SH	WAKIL KETUA
3. AHMAD AIDIN, S.Pd.I	SEKRETARIS
4. H. YOYO SISWOYO	ANGGOTA
5. Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY	ANGGOTA
6. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA
7. M.F. FAHRUROZI, MA	ANGGOTA
8. ROSID	ANGGOTA
9. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si	ANGGOTA
10. H. TANUNG	ANGGOTA
11. SOFATILAH, SH	ANGGOTA
12. Drs. H. AN'IM FALAKHUDIN	ANGGOTA
13. H. KHANAFI, SH	ANGGOTA
14. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	ANGGOTA
15. MUKLISIN NALAHUDIN, SH.MH	ANGGOTA
16. TARSENI	ANGGOTA
17. JUNAEDI, ST	ANGGOTA
18. TO'IF, S.Pd	ANGGOTA
19. SUKARYADI, SE	ANGGOTA
20. Dra. TATI SUHAETI	ANGGOTA
21. SUPIRMAN, SH	ANGGOTA
22. HERMANTO, SH	ANGGOTA

- EKSEKUTIF

DALAM PELAKSANAAN PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014, PANSUS I TIDAK MEMUNGKINKAN MENGUNDANG SEMUA OPD DAN HANYA BISA MENGUNDANG BEBERAPA OPD SAJA DIKARENAKAN KETERBATASAN WAKTU YANG TERSEDIA. ADAPUN OPD YANG DIMAKSUD ADALAH :

1. BAPPEDA
2. INSPEKTORAT
3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
5. BAGIAN PEREKONOMIAN
6. BADAN KESBANGLINMAS
7. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8. BAGIAN HUKUM
9. DISPENDA
10. BKPPD
11. BKP5K
12. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
13. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN
14. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
15. BPR DAN PDAM

II. HASIL PEMBAHASAN

DALAM PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014, PANITIA KHUSUS I DPRD TELAH MELAKUKAN BEBERAPA KEGIATAN BAIK BERUPA RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DENGAN BERBAGAI PAKAR DAN PENINJAUAN KE LAPANGAN. TERKAIT JADUAL KEGIATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. HARI SENIN, TANGGAL 6 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN INTERNAL PENYUSUNAN JADUAL KEGIATAN PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2015.
2. HARI SELASA S/D KAMIS, TANGGAL 7 S/D 9 APRIL 2015
   a. KUNJUNGAN KE DPRD KOTA BATU DAN DPRD KAB. MALANG PROPINSI JAWA TIMUR.
3. HARI JUM'AT, TANGGAL 10 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN INTERNAL PANSUS TENTANG HASIL KUNJUNGAN LUAR DAERAH.
   b. KUNJUNGAN KERJA KE KECAMATAN GUNUNGJATI.
4. HARI SENIN, TANGGAL 13 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN MATERI BAPPEDA, BKPPD DAN BAGIAN HUKUM.
   b. KUNJUNGAN KE PASAR BATIK KECAMATAN PLERED.
5. HARI SELASA, TANGGAL 9 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN MATERI BPPT, DISPENDA
   b. KUNJUNGAN KE BPR KECAMATAN ARJAWINANGUN.
6. HARI RABU, TANGGAL 15 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN MATERI INSPEKTORAT, DISTANBUNNAKHUT
   b. KUNJUNGAN KE KECAMATAN DUKUPUNTANG.

7. HARI KAMIS, TANGGAL 16 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN MATERI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
   b. KUNJUNGAN KE DPRD MAJALENGKA.
8. HARI MINGGU S/D SENIN, TANGGAL 19 S/D 20 APRIL 2015
   a. KONSULTASI KE TIM AHLI INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI JAKARTA
9. HARI SELASA, TANGGAL 21 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN MATERI DISDUKCAPIL, BKP5K
   b. KUNJUNGAN KE PT. IKA NUSA WINDUTAMA KECAMATAN LOSARI.
10. HARI RABU, TANGGAL 22 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN MATERI BAGIAN PEREKONOMIAN, BPR, PDAM
   b. KUNJUNGAN KE DPRD KUNINGAN.
11. HARI KAMIS, TANGGAL 23 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN MATERI DISPERINDAG, KESBANGLINMAS, SATPOL PP
   b. RUMUSAN AKHIR.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

HASIL DARI BERBAGAI KEGIATAN PANSUS I SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS, MAKA BERIKUT INI KAMI SAMPAIKAN CATATAN-CATATAN DAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014 SEBAGAI BERIKUT :

III. REKOMENDASI DAN CATATAN

BAPPEDA

CATATAN :

- SISTEMATIKA BUKU LKPJ YANG KAMI TERIMA TIDAK MUDAH DIPAHAMI SEHINGGA MENYULITKAN DALAM PROSES PEMBAHASAN.
- TERDAPAT BANYAK PERBEDAAN DATA YANG ADA DALAM BUKU LKPJ SAAT DIBANDINGKAN DENGAN DATA YANG DIPEGANG OLEH OPD.
- DALAM RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN, TAMPAKNYA KURANG TERPOLA DENGAN BAIK SEHINGGA DIKHAWATIRKAN MENYIMPANG DARI RPJMD DAN VISI MISI BUPATI.
- DOKUMEN LKPJ YANG KAMI TERIMA TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2014 DAN DPA SKPD TAHUN 2014, PADAHAL KEDUA DOKUMEN TERSEBUT SANGAT DIPERLUKAN UNTUK KAMI JADIKAN DASAR ACUAN PEMBAHASAN LKPJ.

REKOMENDASI

- BAPPEDA DALAM MENYUSUN BUKU LKPJ HARUS LEBIH CERMAT DAN TELITI DENGAN SISTEMATIKA YANG MUDAH DIPAHAMI DISERTAI DATA-DATA AKURAT SEHINGGA TIDAK LAGI DIJUMPAI PERBEDAAN-PERBEDAAN DATA YANG MEMBINGUNGKAN.

- MOHON SUPAYA BAPPEDA DAPAT MENYERTAKAN DOKUMEN RKPD DAN DPA SKPD PADA PENYUSUNAN BUKU LKPJ PADA TAHUN-TAHUN MENDATANG.
- DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN SETIAP TAHUNNYA BAPPEDA HARAP MENGACU PADA VISI, MISI BUPATI, RPJMD, DAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA AGAR DAPAT TERPENUHI SEGALA JANJI-JANJI SAUDARA BUPATI SAAT BERKAMPANYE DIDEPAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

CATATAN :

- PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERDAPAT SEPULUH (10) PROGRAM DAN DUA PULUH TUJUH (27) KEGIATAN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 10.384.954.755 (SEPULUH MILYAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH) DENGAN SILPA SEBESAR RP. 1.408.586.423 (SATU MILYAR EMPAT RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA RUPIAH). DARI SEPULUH PROGRAM YANG ADA, TERDAPAT SATU KEGIATAN PENTING YAKNI PENDATAAN DAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR RP. 1.281.685.100 (SATU MILYAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SERATUS RUPIAH) YANG OUTCOME DAN OUTPUTNYA BELUM TERLIHAT OLEH KAMI.
- TELAH TERHIMPUN OLEH KAMI BANYAKNYA LAPORAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON TERKAIT PEMBUATAN E

KTP, AKTE KELAHIRAN, DAN KK YANG MASIH TERKESAN RUMIT DAN LAMBAT. BANYAK DIJUMPAINYA OKNUM-OKNUM TERTENTUN YANG MEMANFAATKAN KETERLAMBATAN TERSEBUT MENJADI OBJEK PENDAPATAN.

REKOMENDASI

- MENGINGAT SIMPANG SIURNYA DATA KEPENDUDUKAN BAIK YANG DILAKUKAN OLEH BPS ATAU BKKBN, DAN DISISI LAIN DISDUKCAPIL SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI DATA AKURAT SEHINGGA MENGABURKAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON. BAGAIMANA MUNGKIN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DAPAT MENGUKUR NAIK TURUNNYA MUTU PENDIDIKAN, MUTU PELAYANAN KESEHATAN DAN KENAIKAN EKONOMI SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG KETIGANYA MERUPAKAN FAKTOR PENILAIAN NAIK TURUNNYA IPM. APABILA TIDAK MEMILIKI DATA KEPENDUDUKAN YANG PASTI. MENGINGAT PENTINGNYA HAL TERSEBUT, PANSUS I DPRD KABUPATEN CIREBON MEREKOMENDASIKAN KEPADA SAUDARA BUPATI UNTUK MENGOPTIMALKAN PROGRAM PENDATAAN PENDUDUK PAD TAHUN YANG AKAN DATANG.
- SEGERA MELAKUKAN UPAYA SIGNIFIKAN UNTUK MEMPERBAIKI DAN MEMPERCEPAT PELAYANAN E KTP, AKTE KELAHIRAN, DAN KARTU KELUARGA DENGAN :
  a) MEMBUAT CALL CENTER BAGI MASYARAKAT UMUM
  b) MENAMBAH OPERATOR KOMPUTER YANG ITU MERUPAKAN KELUHAN DARI DISDUKCAPIL
  c) MENAMBAH PERALATAN KOMPUTER DAN ALAT-ALAT YANG DIPERLUKAN.
- CERMATI DAN AWASI SERTA TINDAK DENGAN KERAS TERHADAP OKNUM-OKNUM YANG MEMANFAATKAN SITUASI

DENGAN MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM MENGURUS DATA KEPENDUDUKAN.

- CIPTAKAN SINERGITAS YANG BAIK ANTARA DISDUKCAPIL DCENGAN KECAMATAN SEHINGGA TIDAK LAGI MUNCUL KESAN BAHWA MASYARAKAT MERASA TEROMBANG AMBING ANTAR DISDUKCAPIL DAN KECAMATAN.

BKPPD

CATATAN :

- ROTASI, MUTASI DAN PROMOSI JABATAN ADALAH SESUATU YANG WAJAR BAHKAN HARUS DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DALAM RANGKA UPAYA MENCIPTAKAN CLEAN AND GOOFGOVERNANCE. HAL ITU BISA DICAPAI SEPANJANG DILAKUKAN ATAS DASAR PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN. KAMI PANSUS I MENGAPRESIASI SETINGGI TINGGINYA TERHADAP UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARA BUPATI TERKAIT DENGAN MUTASI, ROTASI DAN PROMOSI JABATAN DILINGKLUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON HINGGA SAMPAI KELAPIS BAWAH. SEMOGA SEMUA ITU MEMBAWA MANFAAT DAN PERBAIKAN DI KABUPATEN CIREBON. AKAN TETAPI KARENA SERINGNYA MUTASI, ROTASI DAN PROMOSI JABATAN YAG DILAKUKAN OLEH SAUDARA BUPATI, MAKA MUNCULLAH KERESAHAN-KERESAHAN, INKONDUSIFITAS KERJA, LAHIRNYA WAS-WAS DALAM BEKERJA TERLEBIH-LEBIH MUTASI TERSEBUT DILAKUKAN DILUAR PROFESIONALITAS DIRINYA.

REKOMENDASI

- ROTASI, MUTASI DAN PROMOSI JABATAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN KOMPETENSI BIDANG, KOMPETENSI MANAJERIAL DAN KOMPETENSI SOSIAL SERTA SESEGERA MUNGKIN MEMBUAT REGULASI TERKAIT DENGAN ROTASI DAN MUTASI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATURAN YANG BERLAKU.
- MEMPERTIMBANGKAN JANGKA WAKTU ROTASI DAN MUTASI SUPAYA JANGAN TERKESAN TERLALU SERING DILAKUKAN.
- ROTASI DAN MUTASI DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN DIK DAN DUK. BKPPD HARUS MENGUTAMAKAN DIK BARU KEMUDIAN DUK.
- KEBERADAAN BAPERJAKAT HARAP DIBERDAYAKAN DENGAN OPTIMAL, SUPAYA TIDAK MENIMBULKAN KESAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BAHWA BAPERJAKAT CUMA SEKEDAR SIMBOL TETAPI TIDAK BERFUNGSI.

INSPEKTORAT

CATATAN :

- TERHADAP LHP YANG BERUPA TEMUAN-TEMUAN, INSPEKTORAT TERKESAN EWEUH PAKEUWUH DALAM MENYAMPAIKAN KEPADA PEMBINA KEPEGAWAIAN
- TERDAPAT BENTUK-BENTUK TEMUAN YANG TERUS BERULANG DARI TAHUN KE TAHUN, PADAHAL ADA SATU PEPATAH YANG MENGATAKAN BAHWA "SEBODOH-BODOH ORANG ADALAH ORANG YANG JATUH TERPELOSOK DUA KALI DALAM SATU LOBANG YANG SAMA".
- BANYAK TEMUAN-TEMUAN YANG DITINDAKLANJUTI.

REKOMENDASI

- INSPEKTORAT HARUS LEBIH TEGAS DAN BERANI DALAM MENYAMPAIKAN TEMUAN-TEMUANYA KEPADA PEMBINA KEPEGAWAIAN AGAR KESALAHAN YANG SAMA TIDAK TERUS BERULANG.
- TINGKATKAN PENGAWASAN SECARA OBJEKTIF , TRANSFARAN DAN LAKUKAN BIMBINGAN YANG INTENSIF KEPADA DESA-DESA DI KABUPATEN CIREBON MENGINGAT BESARNYA ALOKASI DANA DESA DARI BERBAGAI SUMBER DIMASA YANG AKAN DATANG.
- INSPEKTORAT AGAR MEMBERIKAN PRESURE KEPADA OBJEK PEMERIKSAAN AGAR TEMUAN-TEMUAN YANG DIPEROLEH DAPAT DITINDAKLANJUTI DAN TIDAK MEMBIARKAN TEMUAN ITU TETAP JADI TEMUAN. HAL INI PENTING UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI, TERTIB HUKUM DAN TERTIB KEUANGAN.

KESBANGLINMAS & SATPOL PP

CATATAN :

- BERAGAMNYA ORMAS YANG ADA DAN MUNCULNYA ORMAS-ORMAS BARU ADALAH SESUATU YANG POSITIF DALAM ALAM DEMOKRASI DEWASA INI, TAPI KETIDAKFAHAMAN MEREKA TERHADAP UNDANG-UNDANG KEORGANISASIAN DAPAT MEMUNCULKAN PROBLEM YANG SERIUS.
- CUKUP BANYAK PERATURAN-PERATURAN DAERAH YANG SUDAH DISAHKAN OELH DPRD TETAPI TIDAK OPTIMAL PADA TATARAN IMPLEMENTASINYA.

REKOMENDASI

- KESBANGLINMAS HARUS KREATIF DAN INOFATIF DALAM MENYEBARKAN INFORMASI DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN KEORGANISASIAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN AGAR TERCIPTA SINERGITAS PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.
- SATPOL PP HARUS BERANI MENINDAK TEGAS DAN ARIF TERHADAP PELANGGAR PERATURAN-PERATURAN DAERAH DEMI TERJAGANYA KEWIBAWAAN PEMERINTAH DAERAH KAB. CIREBON.

DISPENDA

CATATAN :

- ADANYA TEMUAN BPK YANG CUKUP SIGNIFIKAN TERKAIT DENGAN PAJAK REKLAME, MEMBUKTIKAN ADA SESUATU YANG KELIRU YANG DIALKUKAN OLEH DISPENDA. TENTUNYA TEMUAN-TEMUAN ITU MENJADI PELAJARAN BERHARGA BAGI KITA SEMUA.

REKOMENDASI

- TERKAIT DENGAN TEMUAN –TEMUAN BPK DIATAS , DISPENDA HARUS SEGERA MENINDAKLANJUTI DENGAN MELAKUKAN PEMBENAHAN SECARA SERIUS AGAR HAL YANG SAMA TIDAK TERJADI LAGI PADA PEMERIKSAAN BERIKUTNYA.
- PERLU SEGERA MENYIAPKAN PERUBAHAN REGULASI YANG DISESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN DEWASA INI.

DISPERINDAG

CATATAN :

- PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MASIH SANGAT MINIM SEKALI, PADAHAL ITU DAPAT MENINGKATKAN PAD KITA, YANG DEMIKIAN INI DISEBABKAN KARENA KURANG OPTIMALNYA PENATAAN PEGAWAI PASAR.
- PENATAAN PASAR BATIK YANG TERKAIT DENGAN TEMPAT PARKIR DAN PEDAGANG ASONGAN MASIH BELUM TERSENTUH, SEHINGGA MASIH TERLIHAT ACAK-ACAKAN PADAHAL PASAR BATIK BUKAN SAJA MERUPAKAN SENTRA EKONOMI, TAPI JUGA BERPERAN SEBAGAI OBYEK WISATA.

REKOMENDASI

- OPTIMALKAN RETRIBUSI PASAR DENGAN MEMINIMALISIR PUNGUTAN-PUNGUTAN LIAR.
- BENAHI SEGERA SENTRA PASAR BATIK SEBELUM MENJADI TAMBAH RUMIT DIKEMUDIAN HARI.

DISTANBUNNAKHUT

CATATAN :

- TINGGINYA PERMINTAAN ALIH FUNGSI LAHAN, IDENTIK DENGAN LAJUNYA PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN YANG MEMBAWA DAMPAK POSITIF PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. NAMUN DISISI LAIN AREAL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN YANG PRODUKTIF SEMAKIN SEMPIT. SEBAGAI CATATAN KAMI, HAL ITU TERUS TERJADI DIBEBERAPA TEMPAT.

- DITEMUKAN PROGRAM YANG SAMA SEKALI TIDAK DIRENCANAKAN DENGAN MATANG YAKNI PROGRAM PENANAMAN TEMBAKAU. SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA BAHWA LAHAN, IKLIM DAN CUACA DI KABUPATEN CIREBON SANGAT TIDAK COCOK UNTUK PERTANIAN TEMBAKAU. SUNGGUH IRONIS BILA DIANTARA PROGRAM DISTANBUNNAKHUT TERDAPAT PROGRAM PENANAMAN TEMBAKAU YANG PADA AKHIRNYA SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIREALISASIKAN.

REKOMENDASI

- DISTANBUNNAKHUT HARUS CERMAT DAN TELITI DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN ALIH FUNGSI LAHAN.
- DISTANBUNNAKHUT HARAP CERMAT DAN TELITI DALAM MENYUSUN RENCANA-RENCANA KERJA DAN PROGRAM-PROGRAM TAHUNAN YANG LEBIH KONGKRIT DAN RILL SEHINGGA DAPAT TERJANGKAU DAN TEREALISIR DENGAN BAIK.

DISLAKAN

CATATAN DAN REKOMENDASI

- DARI HASIL RAPAT DAN DISKUSI KAMI PANSUS I DPRD KABUPATEN CIREBON, KAMI AMBIL KESIMPULAN BAHWA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BELUM DAPAT MENGOPTIMALKAN PROGRAM-PROGRAM DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI-POTENSI KELAUTAN. UNTUK ITU PANSUS I DPRD KABUPATEN CIREBON MEREKOMENDASIKAN

AGAR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BISA LEBIH KREATIF DALAM MENYUSUN DAN MENSUKSESKAN PROGRAM-PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN SEPERTI PROGRAM BUDI DAYA SIDAT YANG SEDANG DIKEMBANGKAN SAAT INI DI KECAMATAN GEBANG DAN KECAMATAN LOSARI SEHINGGA BISA MERAMBAH KE DAERAH-DAERAH PANTAI LAINNYA.

BKP5K

CATATAN DAN REKOMENDASI

- BANYAK DESA-DESA YANG DINYATAKAN RAWAN PANGAN, AKAN TETAPI BELUM TERSENTUH PENYULUHAN. OLEH KARENA ITU KAMI MEREKOMENDASIKAN KEPADA SAUDARA BUPATI AGAR BKP5K LEBIH INTENSIF MELAKUKAN PENYULUHAN-PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEGIATAN TERSEBUT TIDAK HANYA DILAKUKAN PADA SAAT GAPOKTAN MENDAPATKAN BANTUAN SAJA.

BPPT

CATATAN :

- KEJADIAN TRAGIS MUSIBAH LONGSORNYA GUNUNG KUDA DI DESA CIPANAS KECAMATAN DUKUPUNTANG YANG MENELAN BEBERAPA KORBAN JIWA WARGA KABUPATEN CIREBON SUNGGUH SANGAT MEMILUKAN. PERISTIWA-PERISTIWA MUSIBAH SEPERTI INI SERING MENIMPA WARGA KITA DIBEBERAPA AKTIFITAS GALIAN C LAINNYA. KAMI KHAWATIR SEMUA ITU TERJADI AKIBAT KETELEDORAN BPPT DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN AKTIFITAS GALIAN C.

- DARI SEKIAN BANYAK PROGRAM DAN KEGIATAN BPPT DALAM KURUN WAKTU 2014 LALU, TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM YANG SEBENARNYA KURANG EFEKTIF DAN KURANG BERDAMPAK POSITIF TERHADAP INDIKATOR CAPAIAN KERJA. SALAH SATU CONTOHNYA ADALAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI YANG TIDAK BERDAMPAK PADA MASUKNYA INVESTOR DI KABUPATEN CIREBON.

REKOMENDASI

- BPPT HENDAKNYA TIDAK CEROBOH DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN GALIAN C. MOHON AGAR DILAKUKAN KAJIAN LAPANGAN YANG MENDALAM DAN PENELITIAN YANG LEBIH CERMAT AGAR MUSIBAH-MUSIBAH SERUPA TIDAK TERUS BERULANG.
- BPPT DIMOHON LEBIH CERMAT LAGI DALAM MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM DAN KEGIATAN-KEGIATAN TAHUNAN. PRIORITASKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON.

BAGIAN PEREKONOMIAN/BPR/PDAM

CATATAN :

- TELAH DITEMUKAN DILAPANGAN ADANYA BEBERAPA BPR YANG KONDISINYA HIDUP ENGGAN MATI TAK MAU DAN KONDISI SEPERTI ITU TERABAIKAN BEGITU SAJA HINGGA SAAT INI TANPA SOLUSI.

- AGAK BOSAN SESUNGGUHNYA BILA KITA MENDENGAR KELUHAN KERUGIAN PDAM YANG PADAHAL TERUS SAJA DILAKUKAN PENYERTAAN MODAL OLEH KITA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON. NAMUN DISISI LAIN, KITA JUMPAI PEMAKLUM YANG MEMBUAT KITA TERPAKSA MENERIMA KEADAAN, YAKNI PDAM BUKANLAH PERUSAHAAN YANG FIGUR BISNIS ANSIH, TETAPI DISAMPING BISNIS TERSELIP KEPENTINGAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEBUTUHAN PRIMER YANG CALON PELANGGANNYA BERDERET PANJANG SEBANYAK TIGA RIBU (3.000) CALON PELANGGAN YANG MASUK DALAM DAFTAR WAITING LIST.

REKOMENDASI

- BAGIAN PEREKONOMIAN HENDAKNYA TELITI MENGAMATI KONDISI BPR-BPR YANG LA YAHYA WALA YAMUUT UNTUK DICARIKAN SOLUSI PEMULIHANNYA, BAIK MELALUI MARGER ANTAR BPR MAUPUN SOLUSI-SOLUSI LAINNYA.
- KEBOCORAN-KEBOCORAN AIR PAM DAN RUSAKNYA METER AIR ADALAH PENYEBAB SIGNIFIKAN ATAS KERUGIAN YANG MENIMPA PDAM, LAKUKAN PEMBENAHAN TERKAIT DUA HAL TERSEBUT DENGAN SEGERA.
- SEGERA LAKUKAN KERJASAMA DENGAN PDAM KABUPATEN KUNINGAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KETERSEDIAAN AIR BAKU UNTUK MENANGGULANGI WAITING LIST YANG BERDERET PANJANG.

- OH..... PDAM..... DO'A KAMI SELALU MENYERTAIMU.... SEMOGA ENGKAU SEGERA JAYA DAN MERAUP KEUNTUNGAN YANG BISA MENYUMBANGKAN PAD KABUPATEN CIREBON.

III. PENUTUP

DEMIKIAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS I DPRD TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014.

SELANJUTNYA KAMI SERAHKAN SEPENUHNYA HASIL PEMBAHASAN PANSUS I KEPADA RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT, BERISI CATATAN-CATATAN STRATEGIS SEBAGAI REKOMENDASI KEPADA BUPATI YANG AKAN DITUANGKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD.

SEMOGA ALLAH SWT SELALU MERIDHOI SEGALA UPAYA YANG KITA LAKUKAN.

BILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH

WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

SUMBER, APRIL 2015

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN CIREBON

1. AAN SETYAWAN, S.Si	KETUA	.....	
2. R. CAKRA SUSENO, SH	WAKIL KETUA		.....
3. AHMAD AIDIN, S.Pd.I	SEKRETARIS	.....	
4. H. YOYO SISWOYO	ANGGOTA		.....
5. Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY	ANGGOTA	.....	
6. Hj. AMENAH, SE	ANGGOTA		.....

7.	M.F. FAHRUROZI, MA	ANGGOTA	.....
8.	ROSID	ANGGOTA	.....
9.	ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si	ANGGOTA	.....
10.	H. TANUNG	ANGGOTA	.....
11.	SOFATILAH, SH	ANGGOTA	.....
12.	Drs. H. AN'IM FALAKHUDIN	ANGGOTA	.....
13.	H. KHANAFI, SH	ANGGOTA	.....
14.	DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	ANGGOTA	.....
15.	MUKLISIN NALAHUDIN, SH.MH	ANGGOTA	.....
16.	TARSENI	ANGGOTA	.....
17.	JUNAEDI, ST	ANGGOTA	.....
18.	TO'IF, S.Pd	ANGGOTA	.....
19.	SUKARYADI, SE	ANGGOTA	.....
20.	Dra. TATI SUHAETI	ANGGOTA	.....
21.	SUPIRMAN, SH	ANGGOTA	.....
22.	HERMANTO, SH	ANGGOTA	.....

LAPORAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN CIREBON DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM,

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD;

HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KITA DAPAT BERKUMPUL BERSAMA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014.

KAMI SAMPAIKAN RASA TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DPRD YANG TELAH MEMBERIKAN KEPERCAYAAN KEPADA KAMI PANITIA KHUSUS II UNTUK MEMBAHAS LKPJ BUPATI TAHUN 2014.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PASAL 23 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH REPUBILK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 BAHWA

KEPALA DAERAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2014 KEPADA DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA.

BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT, PADA KESEMPATAN INI KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DISERTAI PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI CIREBON YANG TELAH MENYAMPAIKAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014, PADA TANGGAL 30 MARET YANG LALU, DIHADAPAN RAPAT PARIPURNA DPRD.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAI TINDAKLANJUT DARI LKPJ BUPATI TAHUN 2014 YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA BUPATI, DPRD KABUPATEN CIREBON TELAH MEMBENTUK 2 (DUA) PANITIA KHUSUS YANG DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD NOMOR 3 TAHUN 2015.

KEDUA PANITIA KHUSUS TERSEBUT BERTUGAS UNTUK MENELAAH DAN MENGKAJI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2014 YANG KEMUDIAN AKAN DILAPORKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD.

DISAMPING HAL TERSEBUT DIATAS, YANG TERPENTING DARI KEDUA PANSUS TERSEBUT ADALAH MEMBERIKAN REKOMENDASI DAN CATATAN-CATATAN YANG AKAN DIJADIKAN SEBAGAI KESIMPULAN

DPRD KABUPATEN CIREBON ATAS PENILAIAN DOKUMEN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2014, SEBAGAI REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN CIREBON YANG AKAN DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA SELANJUTNYA.

PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS II TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014 DISUSUN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

I. PENDAHULUAN
II. HASIL PEMBAHASAN
III. REKOMENDASI DAN CATATAN-CATATAN
IV. PENUTUP

SETELAH MENYIMAK, MENDENGAR DAN MENGKAJI MASUKAN-MASUKAN SERTA MELAKUKAN ANALISIS, KEMUDIAN HASILNYA DIBAHAS DALAM RAPAT KERJA PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN CIREBON.

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBAHASAN

- NASKAH PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014 BESERTA SELURUH LAMPIRANNYA YANG DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD TANGGAL 30 MARET 2015;

- PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014 PADA RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD TANGGAL 6 APRIL 2015.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON YAITU :
  1. UNDANG-UNDANG TAHUN 1950 NOMOR 14
  2. UNDANG-UNDANG NOMO 28 TAHUN 1999
  3. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2003
  4. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2004
  5. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 15 TAHUN 2004
  6. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2004
  7. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2014
  8. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 56 TAHUN 2005
  9. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 58 TAHUN 2005
  10. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 8 TAHUN 2006
  11. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 3 TAHUN 2007
  12. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 38 TAHUN 2007
  13. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 41 TAHUN 2007
  14. PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 59 TAHUN 2007
  15. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008
  16. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008
  17. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2010
  18. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
  19. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2009
  20. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2009

21. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2014
22. PERDA KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2014
23. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2015

B. PESERTA RAPAT

- LEGISLATIF

BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2015 TANGGAL 6 APRIL 2015_TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2014, SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. H. MUSTOFA, SH	KETUA DPRD
2. HJ. YUNINGSIH, MM	WK KETUA DPRD
3. WARTIPAN SUWANDA, SH	KETUA PANSUS II
4. RUDIANA, SE	WK KETUA
5. SOFWAN, ST	SEKRETARIS
6. BEJO KASIYONO	ANGGOTA
7. SUHERMAN	ANGGOTA
8. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
9. H. AGUS KURNIAWAN B	ANGGOTA
10. SOPHIE ZULFIA, SH.,MH	ANGGOTA
11. H. SUGIARTO	ANGGOTA
12. PANDI, SE	ANGGOTA
13. Drs. H MUNTAKHBUL FUAD	ANGGOTA
14. HJ. ERYATI	ANGGOTA

15. H. MULUS TRISLA AGENG, SE ANGGOTA
16. HJ. NINING NURHAESIH,M.Pd.I ANGGOTA
17. Drs. H. RASIDA EDI PRIYATNA ANGGOTA
18. WAHIDIN L, S.IP ANGGOTA
19. AHMAD FAWAZ, STP ANGGOTA
20. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc ANGGOTA
21. DINAH WARDINAH ANGGOTA
22. IROH ROHAYATI ANGGOTA
23. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos ANGGOTA
24. H. TARMIDI, SE ANGGOTA
25. JUANSIH ANGGOTA
26. DEWI FATMAWATI, SH ANGGOTA

- EKSEKUTIF

1. DINAS KESEHATAN
2. DINAS PENDIDIKAN
3. DINAS BINA MARGA
4. DINAS SOSIAL
5. DINAS PERHUBUNGAN
6. DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG
7. DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
8. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA
9. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR & PERTAMBANGAN
10. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

11. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
12. BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN
13. BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
14. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

II. HASIL PEMBAHASAN

DALAM RANGKA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014, PANITIA KHUSUS II DPRD TELAH MELAKUKAN BEBERAPA KEGIATAN SEBAGAIMANA JADUAL YANG TELAH DISEPAKATI SEBAGAI BERIKUT :

1. HARI SENIN, TANGGAL 6 APRIL 2015
   a. PENYUSUNAN JADUAL KEGIATAN PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014.
2. HARI SELASA-KAMIS, TANGGAL 7-9 APRIL 2015
   a. STUDYBANDING KE DPRD KAB.PASURUAN & DPRD KOTA MALANG
3. HARI JUMAT, TANGGAL 10 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN HASIL KUNJUNGAN
   b. KUNJUNGAN KE UPT PSDA JAMBLANG
4. HARI SENIN, TANGGAL 13 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014 DENGAN DINKES DAN BAPPEDA
   b. KUNJUNGAN KE RSUD ARJAWINANGUN
5. HARI SELASA, TANGGAL 14 APRIL 2015
   a. PEMBAHASAN LKPJ DENGAN DINAS BINA MARGA DAN BAPPEDA
   b. KUNJUNGAN KE UPT JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH ARJAWINANGUN

6. HARI RABU, TANGGAL 15 APRIL 2015
    a. PEMBAHASAN LKPJ DENGAN DINAS PSDA DAN BAPPEDA
    b. PEMBAHASAN LKPJ DENGAN DINAS SOSIAL DAN DISBUDPARPORA
7. HARI KAMIS, TANGGAL 16 APRIL 2015
    a. PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014 DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN BAPPEDA
    b. KUNJUNGAN KERJA KE SMA N 1 LEMAHABANG
8. HARI MINGGU-SENIN, TANGGAL 19-20 APRIL 2015
    a. KONSULTASI DENGAN PAKAR IPDN JAKARTA
9. HARI SELASA, TANGGAL 21 APRIL 2015
    a. PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014 DENGAN DINAS CIPTAKARYA DAN BAPPEDA
    b. PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014 DENGAN RS.ARJAWINANGUN DAN RS.WALED
10. HARI RABU, TANGGAL 22 APRIL 2015
    a. PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014 DENGAN DINAS PERHUBUNGAN DAN BPPKB.
    b. KUNJUNGAN KERJA KE DPRD KAB.KUNINGAN
11. HARI KAMIS, TANGGAL 23 APRIL 2015
    a. PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014 DENGAN BLHD DAN DISNAKERTRANS
    b. KUNJUNGAN KERJA KE DPRD KAB.INDRAMAYU

KUNJUNGAN YANG DILAKUKAN TELAH MEMBERIKAN BERBAGAI MASUKAN YANG SANGAT BERHARGA BAGI KAMI UNTUK MEMPERKAYA PEMBAHASAN PEMBAHASAN MATERI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DARI HASIL KEGIATAN BAIK PEMBAHASAN MAUPUN KUNJUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA KHUSUS II DENGAN INI KAMI SAMPAIKAN REKOMENDASI DAN CATATAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014 SEBAGAI BERIKUT :

III. REKOMENDASI DAN CATATAN

1. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR & PERTAMBANGAN

CATATAN :

- MASIH TERJADINYA BENCANA BANJIR DIKABUPATEN CIREBON DISEBABKAN PENANGANAN BANJIR YANG MASIH TEMPORER BERSIFAT PARSIAL.
- MASIH BANYAKNYA ASET / TANAH MILIK PSDA YANG BELUM BISA DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL DAN BERUBAH FUNGSI SERTA KURANGNYA KOMUNIKASI ANTAR SKPD TERKAIT PERIZINAN PERTAMBANGAN.

REKOMENDASI :

- DIPERLUKAN PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR OPD TERKAIT PENGELOLAAN ASET PSDA, MENGENAI PERIZINAN PERTAMBANGAN GALIAN C DAN JUGA MENGENAI PENANGANAN LIMBAH BATU ALAM YANG TIDAK KUNJUNG USAI.
- PEMERINTAH HARUS BERPERAN AKTIF DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI LAHAN / TANAH MILIK PSDA YANG BERADA DISETIAP KECAMATAN SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
- DIPERLUKAN RENCANA MATANG DAN PROGRAM JANGKA PANJANG DALAM PENANGANAN BANJIR DIKABUPATEN CIREBON.

2. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

CATATAN :

- KENDARAAN OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN MASIH JAUH DARI CUKUP UNTUK MELAYANI SELURUH WILAYAH DI KABUPATEN CIREBON, YANG IDEALNYA 24 KENDARAAN, SAAT INI HANYA MEMILIKI 12 KENDARAAN DAN KEBERADAAN POS JAGA YANG IDEALNYA 14 POS JAGA SAAT INI HANYA TERDAPAT 9 POS JAGA.
- DIBANGUNNYA BEBERAPA INFRASTRUKTUR DIANTARANYA SPORTCENTER, PASAR BATIK DAN HUTAN KOTA PADA TATARAN PELAKSANAANYA MASIH BANYAK KEKURANGAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSINYA.
- PERSOALAN PERSAMPAHAN YANG PASTINYA SETIAP TAHUN BERTAMBAH KOMPLEKS KARENA DIIKUTI BERTAMBAHNYA PEMUKIMAN MASYARAKAT PERLU MENJADI PERHATIAN KHUSUS.

- MAKIN BERTAMBAHNYA INVESTASI DI KABUPATEN CIREBON TENTUNYA PERLU DIIKUTI RENCANA TATA RUANG WILAYAH YANG LEBIH FLEKSIBLE.

REKOMENDASI :

- PEMERINTAH DAERAH HARUS MENDUKUNG TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN.
- PERLU ADANYA KETEGASAN DARI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA SARANA PRASARANA DIMAKSUD SEHINGGA DIHARAPKAN PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN DAPAT SESUAI STANDAR DAN DIMANFAATKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
- MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK BISA BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI UNTUK BISA SEGERA MENLANJUTKAN ATAU MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN SPORT CENTER.
- MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SAMPAH.
- MENAMBAH PERSONEL DAN ARMADA YANG MENCUKUPI DALAM PENGANGKUTAN SAMPAH SERTA MENINGKATAN KESEJAHTERAAN PASUKAN KUNING.
- SEGERA LAKUKAN REVISI PERDA RT/RW SEHINGGA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN.

3. DINAS BINA MARGA

CATATAN :

- *TREN CAPAIAN KINERJA YANG MENINGKAT DAN PENYERAPAN ANGGARAN YANG HAMPIR MENDEKATI 100% NAMUN KONDISI DILAPANGAN MASIH BANYAK RUAS JALAN DAN JEMBATAN YANG RUSAK.*

REKOMENDASI :

- *PEMERINTAH HARUS SEGERA MENGINVENTARISIR BANGUNAN ATAU INFRASTRUKTUR YANG USIA NYA SUDAH MELEBIHI BATAS AMAN, SEHINGGA DIHARAPKAN TIDAK TERJADI KEJADIAN SEPERTI AMBRUKNYA JEMBATAN DI WILAYAH SUSUKAN LEBAK.*
- *SEGERA MEREVISI SURAT KEPUTUSAN BUPATI TERKAIT JALAN-JALAN YANG BELUM JELAS KEWENANGANNYA.*
- *MELAKUKAN PEMELIHARAAN DAN PEREMAJAAN ALAT-ALAT BERAT YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DINAS BINA MARGA.*

4. DINAS PERHUBUNGAN

CATATAN :

- BIAYA PEMBAYARAN LISTRIK DARI PJU YANG TERLALU BESAR SEHINGGA MEMBERATKAN APBD KABUPATEN CIREBON SEMENTARA KONDISI DILAPANGAN BANYAK PJU YANG MATI.
- PENAMBAHAN TITIK PJU SETIAP TAHUNNYA YANG HANYA 300 TITIK SANGAT TIDAK RASIONAL DENGAN TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD DAN VISI BUPATI YAITU 'CIREBON TERANG'.

- KURANGNYA INOVASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

REKOMENDASI :

- PEMERINTAH PERLU MENGKAJI PENYUSUNAN PERDA PJU YANG MENGATUR TENTANG PERHITUNGAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PJU DENGAN SISTEM METERISASI SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENGHEMAT BIAYA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PJU.
- DINAS PERHUBUNGAN HENDAKNYA MELAKUKAN KAJIAN MENGENAI SISTEM PARKIR BERLANGGANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH.

5. BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

CATATAN :

- TERSERAPNYA ANGGARAN MONITORING DAN EVALUASI HINGGA MENCAPAI 100% TIDAK DIIMBANGI DENGAN KINERJA, DALAM HAL INI MASIH BANYAKNYA GALIAN C, BAIK YANG LEGAL / ILEGAL PADA SAAT PELAKSANAANNYA MAUPUN PASCA GALIAN (REKLAMASI) SEHINGGA MERUSAK LINGKUNGAN DAN EKOSISTEM BAHKAN DAMPAK DARI AKTIFITAS TERSEBUT MEMAKAN KORBAN JIWA.
- BELUM TERSELESAIKANNYA PERMASALAHAN LIMBAH INDUSTRI BATU ALAM.

REKOMENDASI :

- PEMERINTAH DAERAH HARUS BENAR-BENAR SERIUS DALAM MENANGANI MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN, TERUTAMA PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI BATU ALAM YANG TIDAK KUNJUNG TERSELESAIKAN. DIPERLUKAN KOORDINASI / KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENYELESAIANNYA.
- PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR OPD DAN PENGAWASAN DILAPANGAN MENJADI HARGA MATI DALAM SETIAP PROSES PERIZINAN YANG DIKELUARKAN AGAR TIDAK DITEMUKAN LAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN INVESTOR.

6. DINAS KESEHATAN

CATATAN :

- DITEMUKANNYA KASUS GIZI BURUK DIKABUPATEN CIREBON MENANDAKAN MASIH KURANGNYA PERHATIAN PEMERINTAH DALAM URUSAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT.
- KURANG BAIKNYA PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN – BANTUAN BAIK DARI PROVINSI MAUPUN PUSAT.
- KURANG MAKSIMALNYA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN.

REKOMENDASI :

- DIPERLUKAN PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR SKPD DALAM PENANGANAN GIZI BURUK, KARENA HAL TERSEBUT MELIBATKAN BERBAGAI PIHAK YANG ADA DIBEBERAPA SKPD.
- DIPERLUKAN ADANYA PERENCANAAN YANG MATANG DALAM SETIAP PROGRAM / KEGIATAN YANG AKAN BERJALAN SEHINGGA

DIHARAPKAN PENYERAPAN ANGGARAN MENJADI MAKSIMAL DAN TERTIB SECARA ADMINISTRASI.

- PERLU ADANYA PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN SECARA MENYELURUH PADA DINAS KESEHATAN MELALUI PUSKESMAS & JARINGANNYA, MAUPUN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN TERSEDIANYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENYEDIAAN PERALATAN MEDIS YANG MEMADAI. DAN DALAM UPAYA PROTEKSI KESEHATAN TERHADAP WARGA MISKIN PEMERINTAH DAERAH HARUS LEBIH SERIUS UNTUK MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA SEHINGGA DIHARAPKAN PROGRAM JAMKESMAS, JAMKESDA ATAU SKTM BENAR-BENAR BISA DIMANFAATKAN DENGAN MAKSIMAL OLEH MASYARAKAT & TENTUNYA BENAR-BENAR TEPAT SASARAN.

7. BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN

CATATAN :

- PENYERAPAN ANGGARAN SERTA HASIL KINERJA DI RUMAH SAKIT ARJAWINANGUN TIDAK MAKSIMAL DENGAN DIBUKTIKAN SAMPAI PADA SAAT INI MASIH BERJALANNYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN DI RUMAH SAKIT TERSEBUT DAN HASIL FISIK BANGUNANNYA TIDAK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI TEKNIK SEHINGGA BERDAMPAK DENGAN TERLAMBATNYA PENYEDIAAN FASILITAS RUMAH SAKIT YANG AKAN MEMPENGARUHI PELAYANAN MEDIS TERHADAP PASIEN.
- MASIH KURANGNYA KESADARAN TENAGA MEDIS DENGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT MELAYANI MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN.

REKOMENDASI :

- DIPERLUKAN PENGAWASAN DARI PIHAK RUMAH SAKIT SEBAGAI PIHAK YANG NANTINYA AKAN MENGGUNAKAN FASILITAS TERSEBUT AGAR PEKERJAAN YANG DILAKUKAN REKANAN BENAR-BENAR SESUAI DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN SELALU BERKOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT, DALAM HAL INI DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG.
- DIPERLUKAN PENINGKATAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI RUMAH SAKIT DALAM HAL KOMITMEN PELAYANAN YANG PRIMA DAN JUGA DIPERLUKAN KETEGASAN DARI PIHAK MANAJEMEN RUMAH SAKIT UNTUK BISA MELAKUKAN PEMBINAAN SECARA BERKALA BAGI PARA PEGAWAINYA.

8. BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED

CATATAN :

- MASIH ADANYA SARANA DAN PRASARANA YANG KURANG TERPELIHARA DENGAN BAIK SEPERTI SARANA KEBERSIHAN BAGI PASIEN & PENGUNJUNG.
- BANYAKNYA PASIEN PESERTA BPJS KHUSUSNYA KELAS III YANG HARUS MENUNGGU ANTRIAN UNTUK MENDAPATKAN RUANG INAP MAUPUN ICU SEHINGGA BERDAMPAK KEPADA TERGANGGUNYA PELAYANAN MEDIS KEPADA PASIEN TERSEBUT.
- MASIH BELUM MAKSIMALNYA PELAYANAN RUMAH SAKIT WALED, HAL INI TERBUKTI MASIH BANYAKNYA KELUHAN-KELUHAN MASYARAKAT / PASIEN TERHADPA PELAYANAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED YANG CENDERUNG DISKRIMINATIF KHUSUNYA PASIEN PENGGUNA JAMKESMAS, JAMKESDA , SKTM ,

BPJS DIBANDINGKAN DENGAN MASYARAKAT / PASIEN YANG MAMPU.

REKOMENDASI :

- DIPERLUKAN PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN RUANG RAWAT INAP KHUSUSNYA RUANG RAWAT INAP KELAS III DAN RUANG ICU.
- DIPERLUKAN PENINGKATAN LAYANAN DAN KINERJA PERANGKAT KEBERSIHAN RUMAH SAKIT.

9. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

CATATAN :

- ADANYA KEGIATAN BUDAYA YANG TIDAK DIDUKUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB.CIREBON SEHINGGA KURANG BERKEMBANGNYA SENI DAN BUDAYA TERSEBUT.
- BELUM TERKELOLA DAN TERTATA DENGAN BAIK KAWASAN WISATA.
- KURANGNYA PERHATIAN PEMERINTAH KEPADA ATLET – ATLET POTENSIAL MENJADI PENYEBAB MENURUNNYA PRESTASI OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON.

REKOMENDASI :

- AGAR PEMERINTAH DAERAH BISA MENDUKUNG KEGIATAN SENI & BUDAYA BAIK DALAM PENYEDIAAN KEGIATAN DAN JUGA ANGGARANNYA.

- DIPERLUKAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SITUS-SITUS BERSEJARAH DAN KAWASAN WISATA SEBAGAI POTENSI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
- MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ATLET KABUPATEN CIREBON SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN DAN PEMACU SEMANGAT AGAR LEBIH BERPRESTASI.
- PERLU PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN ATLET BERBAKAT BERDASARKAN CABANG OLAHRAGA PRIOROTAS DAERAH.
- *MELAKUKAN KAJIAN DAN PERENCANAAN PEMBUATAN MONUMEN ATAU BANGUNAN KHAS KABUPATEN CIREBON YANG SESUAI DENGAN KULTUR DAN BUDAYA MASYARAKAT CIREBON.*
- *MENJADIKAN RAPAT PARIPURNA PERINGATAN HARIJADI KABUPATEN CIREBON SEBAGAI PUNCAK KEGIATAN GUNA MENJAGA KESAKRALAN PERINGATAN HARIJADI KABUPATEN CIREBON.*

10. DINAS SOSIAL

CATATAN :

- BELUM ADANYA SARANA PENAMPUNGAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAN SOSIAL.
- DITEMUKANNYA PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG TIDAK TEPAT SASARAN.

REKOMENDASI :

- MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENDATAAN YANG LEBIH KETAT DAN SELEKTIF BAGI PENERIMA BANTUAN RUTILAHU.

- PERLU MEMBANGUN SARANA PANTI REHABILITASI DENGAN MEMANFAATKAN ASET PEMERINTAH DAERAH BAGI PENGGUNA NARKOBA , ANAK JALANAN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAN SOSIAL.
- AGAR DINAS SOSIAL LEBIH BERPERAN AKTIF DALAM MENANGANI MUSIBAH ATAU KEJADIAN-KEJADIAN YANG MENIMPA MASYARAKAT.

11. BPPKB

CATATAN :

- BELUM OPTIMALNYA PROGRAM – PROGRAM YANG DIIKUTI DENGAN KEGIATAN YANGG TERUKUR KHUSUSNYA MENGENAI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DIRASAKAN MASIH KURANG.
- MASIH DITEMUKANNYA KASUS GIZI BURUK DAN MASALAH KESEHATAN LAINNYA MENANDAKAN BELUM ADANYA KOORDINASI YANG BAIK ANTAR SKPD YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH KESEHATAN.
- UPAYA PENGGALAKAN PROGRAM KB DIMASYARAKAT BLM OPTIMAL SEHINGGA BERDAMPAK TINGGINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN CIREBON.

REKOMENDASI :

- PERMASALAHAN KESEHATAN BUKAN HANYA BERTUMPU KEPADA SALAH SATU DINAS, DIPERLUKAN PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR SKPD TERKAIT PERSOALAN TERSEBUT TERMASUK

ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN BADAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA.

- KOTA LAYAK ANAK ADALAH SISTEM PEMBANGUNAN SATU WILAYAH ADMINISTRASI YANG MENGINTREGASIKAN KOMITMEN DAN SUMBERDAYA PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA YANG TERENCANA SECARA MENYELURUH DAN BERKELANJUTAN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK. SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK PERLU DIBUAT ATURAN ATAU REGULASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK UNTUK BERKEMBANG BERPARTISIPASI SECARA OPTIMAL SESUAI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA.
- PERLU PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PARTISIPASI DARI SEMUA PIHAK DALAM RANGKA MENGGALAKAN KEMBALI DAN MEMASYARAKATKAN PROGRAM KB DALAM RANGKA MENURUNKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG TERGOLONG MASIH TINGGI.

12. DINAS PENDIDIKAN

CATATAN :

- MASIH BANYAK DITEMUKAN SEKOLAH YANG JUMLAH SISWANYA SEDIKIT ATAU RASIO SISWA PER SEKOLAH TIDAK MERATA.
- MASIH RENDAHNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI PADA JENJANG SMA.
- MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG BELUM BISA MEMBACA DAN MENULIS (MELEK HURUF)

- MASIH BANYAKNYA BIAYA TAMBAHAN SEKOLAH YANG MENJADI KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH PADA MURID (DENGAN ISTILAH DANA PARTISIPASI STUDY TOUR) YANG SEOLAH-OLAH MELIBATKAN KOMITE SEKOLAH.

REKOMENDASI :

- BERKAITAN DENGAN MASALAH KEKURANGAN TENAGA PENDIDIKAN/GURU KHUSUSNYA GURU PNS DISEKOLAH DASAR AGAR SEGERA DIATASI, SALAH SATUNYA DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM PENGGABUNGAN / MERGER TERHADAP SEKOLAH-SEKOLAH YANG MENGALAMI KEKURANGAN SISWA TENTUNYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN LETAK DAN LOKASI SEKOLAH YANG AKAN DIMERGER/DIGABUNG.
- SESUAI DENGAN RPJMD KAB.CRB PADA TAHUN 2019 DIRENCANAKAN BEBAS BUTA AKSARA MAKA PROGRAM BEBAS BUTA AKSARA PERLU SEGERA DIPRIOROTASKAN DAN UNTUK MENJADI PERHATIAN KHUSUS.
- DALAM RANGKA PENCAPAIAN RATA RATA LAMA SEKOLAH KIRANYA PEMENRINTAH DAERAH BERUPAYA MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DROP OUT BAGI PARA SISWA MELALUI PROGRAM KEGIATAN YANG DAPAT MENUNJANG MENINGKATNYA RATA-RAT LAMA SEKOLAH DAN KIRANYA UNTUK DIPRIORITASKAN ANGGARANNYA.

13. DINAS KETENAGAKERJAAN & TRANSMIGRASI

CATATAN :

- SECARA UMUM PEMERINTAH BELUM DAPAT MENYEDIAKAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG LAYAK SEHINGGA MINAT MASYARAKAT UNTUK MENJADI TKI MASIH SANGAT TINGGI
- MASIH RENDAHNYA DAYA SAING TENAGA KERJA KARENA LEBIH BANYAK YANG BEKERJA DI SEKTOR NONFORMAL
- PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN TENTUNYA MEMILIKI DAMPAK YANG BERLIPAT MULTIDIMENSIONAL APALAGI HAL INI BERKAITAN DENGAN ASPEK SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, UNTUK ITU PERMASALAHAN YANG ADA HARUS SEGERA DISELESAIKAN SECARA SITEM DAN EFEKTIF.

REKOMENDASI :

- TERHADAP PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TKI DI KABUPATEN CIREBON AGAR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJALIN KERJASAMA DENGAN BERBAGAI INSTANSI TERKAIT, SEBAGAI LANGKAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA TKI.
- TINGGINYA MINAT MASYARAKAT YANG MENJADI TKI TIDAK SERTA MERTA DIKARENAKAN PERSOALAN KETERBATASAN KESEMPATAN KERJA MELAINKAN KARENA BERBAGAI FAKTOR SEPERTI EKONOMI DAN POLA PIKIR MASYARAKAT. DIPERLUKAN KERJASAMA SEMUA PIHAK UNTUK MENGUBAH POLA PIKIR DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN.
- PERLU MENJALIN KEMITRAAN DAN MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SECARA TERBUKA DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.

- PERLU MENDORONG DAN MEMBINA PUSAT-PUSAT PELATIHAN KETRAMPILAN AGAR MENINGKATKAN STANDAR KOMPETENSINYA DAN MENCIPTAKAN IKLIM DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI DAN MASYARAKAT PEKERJA YANG SEHAT.

DARI HASIL PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014 DENGAN BEBERAPA SKPD, PANSUS II BERKESIMPULAN BAHWA KETERBATASAN ANGGARAN HENDAKNYA TIDAK MENJADI KENDALA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DALAM MENCAPAI VISI DAN MISI YANG DICANANGKAN BUPATI. DINAS HARUS BERPERAN AKTIF DALAM MENJEMPUT DAN MEMANFAATKAN BANTUAN DARI PROVINSI MAUPUN DARI PUSAT.

PERLU EVALUASI BIDANG PERENCANAAN DI MASING-MASING SKPD AGAR MENGHASILKAN PERENCAAN YANG MAKSIMAL DAN SELARAS DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH DISUSUN BAPPEDA SEHINGGA SESUAI DENGAN VISI MISI BUPATI YANG TERTUANG DALAM RPJMD.

PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR MASING-MASING OPD KIRANYA DAPAT DIRENCANAKAN SECARA TERPADU DAN DIARAHKAN UNTUK MENDORONG POTENSI DAERAH SEHINGGA MEMBUKA AKSES PELUANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT.

KAMI JUGA MEMINTA KETEGASAN BUPATI AGAR KEPALA OPD YANG KINERJANYA TIDAK BAGUS SESUAI DENGAN REKOMENDASI BPK DIREKOMENDASIKAN AGAR DIGANTI DENGAN PAJABAT BARU.

KAMI MENYAMPAIKAN SARAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM PENYAJIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2015 YANG AKAN DATANG AGAR TEPAT WAKTU, KOORDINASI LEBIH DITINGKATKAN, TERUTAMA KEHADIRAN DARI BAPPEDA DALAM SETIAP PEMBAHASAN LKPJ SERTA DATA-DATA YANG DISAJIKAN LEBIH AKURAT DAN SESUAI DENGAN FAKTA DILAPANGAN.

IV. PENUTUP

DEMIKIAN HASIL PENELAAHAN PANITIA KHUSUS II DPRD TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014.

SELANJUTNYA DENGAN INI KAMI SERAHKAN SEPENUHNYA HASIL PEMBAHASAN PANSUS II KEPADA RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT, BERISI CATATAN-CATATAN STRATEGIS BIDANG GARAPAN URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN SEBAGAI REKOMENDASI KEPADA BUPATI YANG AKAN DITUANGKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD.

MENGAKHIRI LAPORAN INI, PANSUS II MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DISERTAI PENGHARGAAN KEPADA SAUDARA BUPATI BESERTA STAF DAN SELURUH JAJARANNYA ATAS SEGALA USAHA DAN KERJA KERASNYA.

SELANJUTNYA KAMI MOHON MAAF YANG SEDALAM-DALAMNYA MANAKALA ADA SILANG PENDAPAT DAN LAIN SEBAGAINYA BAIK PADA SAAT PENINJAUAN LAPANGAN MAUPUN DALAM PEMBAHASAN.

SEMOGA ALLAH SWT SELALU MERIDHOI SEGALA UPAYA YANG KITA LAKUKAN.

BILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

SUMBER, APRIL 2015
PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN CIREBON

1. H. MUSTOFA, SH	KETUA DPRD	.....
2. HJ. YUNINGSIH, MM	WK KETUA DPRD	.....
3. WARTIPAN SUWANDA, SH	KETUA PANSUS II	.....
4. RUDIANA, SE	WK KETUA	.....
5. SOFWAN, ST	SEKRETARIS	.....
6. BEJO KASIYONO	ANGGOTA	.....
7. SUHERMAN	ANGGOTA	.....
8. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA	.....
9. H. AGUS KURNIAWAN B	ANGGOTA	.....
10. SOPHIE ZULFIA, SH.,MH	ANGGOTA	.....
11. H. SUGIARTO	ANGGOTA	.....
12. PANDI, SE	ANGGOTA	.....
13. Drs. H MUNTAKHBUL FUAD	ANGGOTA	.....

14.	HJ. ERYATI	ANGGOTA	.....
15.	H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA	.....
16.	HJ. NINING N. ,M.Pd.I	ANGGOTA	.....
17.	Drs. H. RASIDA EDI P.	ANGGOTA	.....
18.	WAHIDIN L, S.IP	ANGGOTA	.....
19.	AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA	.....
20.	NOVA F, Lc	ANGGOTA	.....
21.	DINAH WARDINAH	ANGGOTA	.....
22.	IROH ROHAYATI	ANGGOTA	.....
23.	H. AKYAS SAFITRI, S.Sos	ANGGOTA	.....
24.	H. TARMIDI, SE	ANGGOTA	.....
25.	JUANSIH	ANGGOTA	.....
26.	DEWI FATMAWATI, SH	ANGGOTA	.....

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON
TAHUN 2014

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Jalan Sunan Bonang Nomor 1 Sumber
Telp. (0231) 321259 Fax. (0231) 323865

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 30 April 2015

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIREBON TAHUN 2014

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara.

Selain itu pemberian kewenangan yang luas kepada daerah mengandung konsekuensi pada setiap pejabat publik dituntut harus dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijaksanaannya kepada publik sebagaimana wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelengaraan pemerintahan daerah.

Sebagai konsistensi terhadap komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2009-2014 yang merupakan penjabaran visi, misi, arah dan strategi pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, kebijakan-kebijakan yang termuat dalam RPJMD dipertanggungjawabkan atau dilaporkan kepada DPRD dan diinformasikan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah agar sistematis dan obyektif, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan RPJMD sebagai tolok ukur perwujudan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mekanisme dan penyampaian hasil pembahasan terhadap LKPJ telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya Bupati Cirebon telah menyampaikan LKPJ Tahun 2014 kepada DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 30 Maret 2015. Sedangkan untuk pembahasan terhadap LKPJ Tahun 2014 tersebut, DPRD telah membentuk 2 (dua) Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Internal tanggal 6 April 2015 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2015.

Adapun pedoman mengenai LKPJ Kepala Daerah yakni ruang lingkup, muatan dan tata cara penyampaian, telah diatur dalam Pasal 15 s/d 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. Ketentuan Pasal 16 bahwa LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah dalam masa kepemimpinan.

Untuk merealisasikan visi pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang meliputi :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlakulkarimah melalui pendidikan agama
b. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga miskin
c. Membangun pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
d. Memantapkan potensi dasar perekonomian rakyat

Sebagai perwujudan visi dan misi Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembangunan tahun 2014 yakni :

a. Peningkatan pelayanan pendidikan dan efisiensi biaya pendidikan melalui rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
b. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan fasilitas dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kesehatan dan perluasan jangkauan puskesmas, puskesmas keliling, pustu, jaringan puskemas dan pos pengobatan pada daerah perbatasan, peningkatan kewaspadaan dini terhadap munculnya berbagai penyakit melalui strategi pencegahan

penyakit menular dan tidak menular dan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh

c. Penanggulangan akibat krisis ekonomi global melalui pengurangan angka pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat
d. Peningkatan dan Pemerataan pembangunan infrastruktur pada semua sector.
e. Penanggulangan dampak lingkungan hidup melalui penurunan dampak lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

Bahwa sebagaimana laporan hasil pembahasan masing – masing panitia khusus I dan II DPRD Kabupaten Cirebon tentang pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2014, DPRD Kabupaten Cirebon merekomendasikan hal – hal yang berupa catatan – catatan strategis yang berisikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten Cirebon dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. REKOMENDASI

1. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, MAKA DPRD MEREKOMENDASIKAN :

DINAS PENDIDIKAN

CATATAN :

- MASIH BANYAK DITEMUKAN SEKOLAH YANG JUMLAH SISWANYA SEDIKIT ATAU RASIO SISWA PER SEKOLAH TIDAK MERATA.
- MASIH RENDAHNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI PADA JENJANG SMA.
- MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT YANG BELUM BISA MEMBACA DAN MENULIS (MELEK HURUF)
- MASIH BANYAKNYA BIAYA TAMBAHAN SEKOLAH YANG MENJADI KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH PADA MURID (DENGAN ISTILAH DANA PARTISIPASI STUDY TOUR) YANG SEOLAH-OLAH MELIBATKAN KOMITE SEKOLAH.

REKOMENDASI :

- BERKAITAN DENGAN MASALAH KEKURANGAN TENAGA PENDIDIKAN/GURU KHUSUSNYA GURU PNS DISEKOLAH DASAR AGAR SEGERA DIATASI, SALAH SATUNYA DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM PENGGABUNGAN / MERGER TERHADAP SEKOLAH-SEKOLAH YANG MENGALAMI KEKURANGAN SISWA TENTUNYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN LETAK DAN LOKASI SEKOLAH YANG AKAN DIMERGER/DIGABUNG.
- SESUAI DENGAN RPJMD KAB. CIREBON PADA TAHUN 2019 DIRENCANAKAN BEBAS BUTA AKSARA MAKA PROGRAM BEBAS BUTA AKSARA PERLU SEGERA DIPRIOROTASKAN DAN UNTUK MENJADI PERHATIAN KHUSUS.

- DALAM RANGKA PENCAPAIAN RATA RATA LAMA SEKOLAH KIRANYA PEMENRINTAH DAERAH BERUPAYA MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DROP OUT BAGI PARA SISWA MELALUI PROGRAM KEGIATAN YANG DAPAT MENUNJANG MENINGKATNYA RATA-RAT LAMA SEKOLAH DAN KIRANYA UNTUK DIPRIORITASKAN ANGGARANNYA.

DINAS KESEHATAN

CATATAN :

- DITEMUKANNYA KASUS GIZI BURUK DIKABUPATEN CIREBON MENANDAKAN MASIH KURANGNYA PERHATIAN PEMERINTAH DALAM URUSAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT.
- KURANG BAIKNYA PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN – BANTUAN BAIK DARI PROVINSI MAUPUN PUSAT.
- KURANG MAKSIMALNYA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN.

REKOMENDASI :

- DIPERLUKAN PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR SKPD DALAM PENANGANAN GIZI BURUK, KARENA HAL TERSEBUT MELIBATKAN BERBAGAI PIHAK YANG ADA DIBEBERAPA SKPD.
- DIPERLUKAN ADANYA PERENCANAAN YANG MATANG DALAM SETIAP PROGRAM / KEGIATAN YANG AKAN BERJALAN SEHINGGA DIHARAPKAN PENYERAPAN ANGGARAN MENJADI MAKSIMAL DAN TERTIB SECARA ADMINISTRASI.
- PERLU ADANYA PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN SECARA MENYELURUH PADA DINAS KESEHATAN

MELALUI PUSKESMAS & JARINGANNYA, MAUPUN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DENGAN TERSEDIANYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENYEDIAAN PERALATAN MEDIS YANG MEMADAI. DAN DALAM UPAYA PROTEKSI KESEHATAN TERHADAP WARGA MISKIN PEMERINTAH DAERAH HARUS LEBIH SERIUS UNTUK MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA SEHINGGA DIHARAPKAN PROGRAM JAMKESMAS, JAMKESDA ATAU SKTM BENAR-BENAR BISA DIMANFAATKAN DENGAN MAKSIMAL OLEH MASYARAKAT & TENTUNYA BENAR-BENAR TEPAT SASARAN.

BRSUD ARJAWINANGUN

CATATAN :

- PENYERAPAN ANGGARAN SERTA HASIL KINERJA DI RUMAH SAKIT ARJAWINANGUN TIDAK MAKSIMAL DENGAN DIBUKTIKAN SAMPAI PADA SAAT INI MASIH BERJALANNYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN DI RUMAH SAKIT TERSEBUT DAN HASIL FISIK BANGUNANNYA TIDAK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI TEKNIK SEHINGGA BERDAMPAK DENGAN TERLAMBATNYA PENYEDIAAN FASILITAS RUMAH SAKIT YANG AKAN MEMPENGARUHI PELAYANAN MEDIS TERHADAP PASIEN.
- MASIH KURANGNYA KESADARAN TENAGA MEDIS DENGAN TUGAS DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT MELAYANI MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN.
- MASIH BELUM MAKSIMALNYA PELAYANAN RUMAH SAKIT ARJAWINANGUN, HAL INI TERBUKTI MASIH BANYAKNYA

KELUHAN-KELUHAN MASYARAKAT / PASIEN TERHADPA PELAYANAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN YANG CENDERUNG DISKRIMINATIF KHUSUNYA PASIEN PENGGUNA JAMKESMAS, JAMKESDA , SKTM , BPJS DIBANDINGKAN DENGAN MASYARAKAT / PASIEN YANG MAMPU.

REKOMENDASI :

- DIPERLUKAN PENGAWASAN DARI PIHAK RUMAH SAKIT SEBAGAI PIHAK YANG NANTINYA AKAN MENGGUNAKAN FASILITAS TERSEBUT AGAR PEKERJAAN YANG DILAKUKAN REKANAN BENAR-BENAR SESUAI DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN SELALU BERKOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT, DALAM HAL INI DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG.
- DIPERLUKAN PENINGKATAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI RUMAH SAKIT DALAM HAL KOMITMEN PELAYANAN YANG PRIMA DAN JUGA DIPERLUKAN KETEGASAN DARI PIHAK MANAJEMEN RUMAH SAKIT UNTUK BISA MELAKUKAN PEMBINAAN SECARA BERKALA BAGI PARA PEGAWAINYA.

BRSUD WALED

CATATAN :

- MASIH ADANYA SARANA DAN PRASARANA YANG KURANG TERPELIHARA DENGAN BAIK SEPERTI SARANA KEBERSIHAN BAGI PASIEN & PENGUNJUNG.

- BANYAKNYA PASIEN PESERTA BPJS KHUSUSNYA KELAS III YANG HARUS MENUNGGU ANTRIAN UNTUK MENDAPATKAN RUANG INAP MAUPUN ICU SEHINGGA BERDAMPAK KEPADA TERGANGGUNYA PELAYANAN MEDIS KEPADA PASIEN TERSEBUT.

REKOMENDASI :

- DIPERLUKAN PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN RUANG RAWAT INAP KHUSUSNYA RUANG RAWAT INAP KELAS III DAN RUANG ICU.
- DIPERLUKAN PENINGKATAN LAYANAN DAN KINERJA PERANGKAT KEBERSIHAN RUMAH SAKIT.

DINAS BINA MARGA

CATATAN :

- *TREN CAPAIAN KINERJA YANG MENINGKAT DAN PENYERAPAN ANGGARAN YANG HAMPIR MENDEKATI 100% NAMUN KONDISI DILAPANGAN MASIH BANYAK RUAS JALAN DAN JEMBATAN YANG RUSAK.*

REKOMENDASI :

- *PEMERINTAH HARUS SEGERA MENGINVENTARISIR BANGUNAN ATAU INFRASTRUKTUR YANG USIA NYA SUDAH MELEBIHI BATAS AMAN, SEHINGGA DIHARAPKAN TIDAK TERJADI KEJADIAN SEPERTI AMBRUKNYA JEMBATAN DI WILAYAH SUSUKAN LEBAK.*

- *SEGERA MEREVISI SURAT KEPUTUSAN BUPATI TERKAIT JALAN-JALAN YANG BELUM JELAS KEWENANGANNYA.*
  MELAKUKAN PEMELIHARAAN DAN PEREMAJAAN ALAT-ALAT BERAT YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DINAS BINA MARGA.

DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG

CATATAN :

- KENDARAAN OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN MASIH JAUH DARI CUKUP UNTUK MELAYANI SELURUH WILAYAH DI KABUPATEN CIREBON, YANG IDEALNYA 24 KENDARAAN, SAAT INI HANYA MEMILIKI 12 KENDARAAN DAN KEBERADAAN POS JAGA YANG IDEALNYA 14 POS JAGA SAAT INI HANYA TERDAPAT 9 POS JAGA.
- DIBANGUNNYA BEBERAPA INFRASTRUKTUR DIANTARANYA SPORTCENTER, PASAR BATIK DAN HUTAN KOTA PADA TATARAN PELAKSANAANYA MASIH BANYAK KEKURANGAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSINYA.
- PERSOALAN PERSAMPAHAN YANG PASTINYA SETIAP TAHUN BERTAMBAH KOMPLEKS KARENA DIIKUTI BERTAMBAHNYA PEMUKIMAN MASYARAKAT PERLU MENJADI PERHATIAN KHUSUS.
- MAKIN BERTAMBAHNYA INVESTASI DI KABUPATEN CIREBON TENTUNYA PERLU DIIKUTI RENCANA TATA RUANG WILAYAH YANG LEBIH FLEKSIBLE.

REKOMENDASI :

- PEMERINTAH DAERAH HARUS MENDUKUNG TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN.
- PERLU ADANYA KETEGASAN DARI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA SARANA PRASARANA DIMAKSUD SEHINGGA DIHARAPKAN PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN DAPAT SESUAI STANDAR DAN DIMANFAATKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
- MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK BISA BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROVINSI UNTUK BISA SEGERA MENLANJUTKAN ATAU MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN SPORT CENTER.
- MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PELATIHAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN SAMPAH.
- MENAMBAH PERSONEL DAN ARMADA YANG MENCUKUPI DALAM PENGANGKUTAN SAMPAH SERTA MENINGKATAN KESEJAHTERAAN PASUKAN KUNING.
- SEGERA LAKUKAN REVISI PERDA RT/RW SEHINGGA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN.

DINAS PSDAP

CATATAN :

- MASIH TERJADINYA BENCANA BANJIR DIKABUPATEN CIREBON DISEBABKAN PENANGANAN BANJIR YANG MASIH TEMPORER BERSIFAT PARSIAL.

- MASIH BANYAKNYA ASET / TANAH MILIK PSDA YANG BELUM BISA DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL DAN BERUBAH FUNGSI SERTA KURANGNYA KOMUNIKASI ANTAR SKPD TERKAIT PERIZINAN PERTAMBANGAN.

REKOMENDASI :

- DIPERLUKAN PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR OPD TERKAIT PENGELOLAAN ASET PSDA, MENGENAI PERIZINAN PERTAMBANGAN GALIAN C DAN JUGA MENGENAI PENANGANAN LIMBAH BATU ALAM YANG TIDAK KUNJUNG USAI.
- PEMERINTAH HARUS BERPERAN AKTIF DALAM MENGEMBALIKAN FUNGSI LAHAN / TANAH MILIK PSDA YANG BERADA DISETIAP KECAMATAN SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
- DIPERLUKAN RENCANA MATANG DAN PROGRAM JANGKA PANJANG DALAM PENANGANAN BANJIR DIKABUPATEN CIREBON.

BAPPEDA

CATATAN :

- SISTEMATIKA BUKU LKPJ YANG KAMI TERIMA TIDAK MUDAH DIPAHAMI SEHINGGA MENYULITKAN DALAM PROSES PEMBAHASAN.
- TERDAPAT BANYAK PERBEDAAN DATA YANG ADA DALAM BUKU LKPJ SAAT DIBANDINGKAN DENGAN DATA YANG DIPEGANG OLEH OPD.

JANJI-JANJI SAUDARA BUPATI SAAT BERKAMPANYE DIDEPAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON.

DINAS PERHUBUNGAN

CATATAN :

- BIAYA PEMBAYARAN LISTRIK DARI PJU YANG TERLALU BESAR SEHINGGA MEMBERATKAN APBD KABUPATEN CIREBON SEMENTARA KONDISI DILAPANGAN BANYAK PJU YANG MATI.
- PENAMBAHAN TITIK PJU SETIAP TAHUNNYA YANG HANYA 300 TITIK SANGAT TIDAK RASIONAL DENGAN TARGET YANG DITETAPKAN DALAM RPJMD DAN VISI BUPATI YAITU 'CIREBON TERANG'.
- KURANGNYA INOVASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

REKOMENDASI :

- PEMERINTAH PERLU MENGKAJI PENYUSUNAN PERDA PJU YANG MENGATUR TENTANG PERHITUNGAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PJU DENGAN SISTEM METERISASI SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENGHEMAT BIAYA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PJU.
- DINAS PERHUBUNGAN HENDAKNYA MELAKUKAN KAJIAN MENGENAI SISTEM PARKIR BERLANGGANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH.

BLHD

CATATAN :

- TERSERAPNYA ANGGARAN MONITORING DAN EVALUASI HINGGA MENCAPAI 100% TIDAK DIIMBANGI DENGAN KINERJA, DALAM HAL INI MASIH BANYAKNYA GALIAN C, BAIK

YANG LEGAL / ILEGAL PADA SAAT PELAKSANAANNYA MAUPUN PASCA GALIAN (REKLAMASI) SEHINGGA MERUSAK LINGKUNGAN DAN EKOSISTEM BAHKAN DAMPAK DARI AKTIFITAS TERSEBUT MEMAKAN KORBAN JIWA.

- BELUM TERSELESAIKANNYA PERMASALAHAN LIMBAH INDUSTRI BATU ALAM.

REKOMENDASI :

- PEMERINTAH DAERAH HARUS BENAR-BENAR SERIUS DALAM MENANGANI MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN, TERUTAMA PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI BATU ALAM YANG TIDAK KUNJUNG TERSELESAIKAN. DIPERLUKAN KOORDINASI / KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENYELESAIANNYA.
- PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR OPD DAN PENGAWASAN DILAPANGAN MENJADI HARGA MATI DALAM SETIAP PROSES PERIZINAN YANG DIKELUARKAN AGAR TIDAK DITEMUKAN LAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN INVESTOR.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

CATATAN :

- PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERDAPAT SEPULUH (10) PROGRAM DAN DUA PULUH TUJUH (27) KEGIATAN DENGAN ANGGARAN SEBESAR RP. 10.384.954.755 (SEPULUH MILYAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH) DENGAN SILPA SEBESAR RP. 1.408.586.423 (SATU MILYAR EMPAT

RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA RUPIAH). DARI SEPULUH PROGRAM YANG ADA, TERDAPAT SATU KEGIATAN PENTING YAKNI PENDATAAN DAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR RP. 1.281.685.100 (SATU MILYAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SERATUS RUPIAH) YANG OUTCOME DAN OUTPUTNYA BELUM TERLIHAT OLEH KAMI.

- TELAH TERHIMPUN OLEH KAMI BANYAKNYA LAPORAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON TERKAIT PEMBUATAN E KTP, AKTE KELAHIRAN, DAN KK YANG MASIH TERKESAN RUMIT DAN LAMBAT. BANYAK DIJUMPAINYA OKNUM-OKNUM TERTENTUN YANG MEMANFAATKAN KETERLAMBATAN TERSEBUT MENJADI OBJEK PENDAPATAN.

REKOMENDASI

- MENGINGAT SIMPANG SIURNYA DATA KEPENDUDUKAN BAIK YANG DILAKUKAN OLEH BPS ATAU BKKBN, DAN DISISI LAIN DISDUKCAPIL SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI DATA AKURAT SEHINGGA MENGABURKAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON. BAGAIMANA MUNGKIN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DAPAT MENGUKUR NAIK TURUNNYA MUTU PENDIDIKAN, MUTU PELAYANAN KESEHATAN DAN KENAIKAN EKONOMI SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG KETIGANYA MERUPAKAN FAKTOR PENILAIAN NAIK TURUNNYA IPM. APABILA TIDAK MEMILIKI DATA KEPENDUDUKAN YANG PASTI. MAKA MENGINGAT PENTINGNYA HAL TERSEBUT, PANSUS I DPRD KABUPATEN CIREBON MEREKOMENDASIKAN KEPADA

SAUDARA BUPATI UNTUK MENGOPTIMALKAN PROGRAM PENDATAAN PENDUDUK PAD TAHUN YANG AKAN DATANG.

- SEGERA MELAKUKAN UPAYA SIGNIFIKAN UNTUK MEMPERBAIKI DAN MEMPERCEPAT PELAYANAN E KTP, AKTE KELAHIRAN, DAN KARTU KELUARGA DENGAN :
  a) MEMBUAT CALL CENTER BAGI MASYARAKAT UMUM
  b) MENAMBAH OPERATOR KOMPUTER YANG ITU MERUPAKAN KELUHAN DARI DISDUKCAPIL
  c) MENAMBAH PERALATAN KOMPUTER DAN ALAT-ALAT YANG DIPERLUKAN.
- CERMATI DAN AWASI SERTA TINDAK DENGAN KERAS TERHADAP OKNUM-OKNUM YANG MEMANFAATKAN SITUASI DENGAN MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM MENGURUS DATA KEPENDUDUKAN.
- CIPTAKAN SINERGITAS YANG BAIK ANTARA DISDUKCAPIL DCENGAN KECAMATAN SEHINGGA TIDAK LAGI MUNCUL KESAN BAHWA MASYARAKAT MERASA TEROMBANG AMBING ANTAR DISDUKCAPIL DAN KECAMATAN.

BPPKB

CATATAN :

- BELUM OPTIMALNYA PROGRAM – PROGRAM YANG DIIKUTI DENGAN KEGIATAN YANGG TERUKUR KHUSUSNYA MENGENAI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DIRASAKAN MASIH KURANG.
- MASIH DITEMUKANNYA KASUS GIZI BURUK DAN MASALAH KESEHATAN LAINNYA MENANDAKAN BELUM ADANYA KOORDINASI YANG BAIK ANTAR SKPD YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH KESEHATAN.

- UPAYA PENGGALAKAN PROGRAM KB DIMASYARAKAT BLM OPTIMAL SEHINGGA BERDAMPAK TINGGINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN CIREBON.

REKOMENDASI :

- PERMASALAHAN KESEHATAN BUKAN HANYA BERTUMPU KEPADA SALAH SATU DINAS, DIPERLUKAN PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR SKPD TERKAIT PERSOALAN TERSEBUT TERMASUK ANTARA DINAS KESEHATAN DENGAN BADAN PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA.
- KOTA LAYAK ANAK ADALAH SISTEM PEMBANGUNAN SATU WILAYAH ADMINISTRASI YANG MENGINTREGASIKAN KOMITMEN DAN SUMBERDAYA PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA YANG TERENCANA SECARA MENYELURUH DAN BERKELANJUTAN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK. SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK PERLU DIBUAT ATURAN ATAU REGULASI MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK UNTUK BERKEMBANG BERPARTISIPASI SECARA OPTIMAL SESUAI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA.
- PERLU PENINGKATAN PENYULUHAN DAN PARTISIPASI DARI SEMUA PIHAK DALAM RANGKA MENGGALAKAN KEMBALI DAN MEMASYARAKATKAN PROGRAM KB DALAM RANGKA MENURUNKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG TERGOLONG MASIH TINGGI.

DINAS SOSIAL

CATATAN :

- BELUM ADANYA SARANA PENAMPUNGAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAN SOSIAL.
- DITEMUKANNYA PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG TIDAK TEPAT SASARAN.

REKOMENDASI :

- MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENDATAAN YANG LEBIH KETAT DAN SELEKTIF BAGI PENERIMA BANTUAN RUTILAHU.
- PERLU MEMBANGUN SARANA PANTI REHABILITASI DENGAN MEMANFAATKAN ASET PEMERINTAH DAERAH BAGI PENGGUNA NARKOBA , ANAK JALANAN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAN SOSIAL.
- AGAR DINAS SOSIAL LEBIH BERPERAN AKTIF DALAM MENANGANI MUSIBAH ATAU KEJADIAN-KEJADIAN YANG MENIMPA MASYARAKAT.

DISNAKERTRANS

CATATAN :

- SECARA UMUM PEMERINTAH BELUM DAPAT MENYEDIAKAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG LAYAK SEHINGGA MINAT MASYARAKAT UNTUK MENJADI TKI MASIH SANGAT TINGGI
- MASIH RENDAHNYA DAYA SAING TENAGA KERJA KARENA LEBIH BANYAK YANG BEKERJA DI SEKTOR NONFORMAL

- PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN TENTUNYA MEMILIKI DAMPAK YANG BERLIPAT MULTIDIMENSIONAL APALAGI HAL INI BERKAITAN DENGAN ASPEK SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, UNTUK ITU PERMASALAHAN YANG ADA HARUS SEGERA DISELESAIKAN SECARA SITEM DAN EFEKTIF.

REKOMENDASI :

- TERHADAP PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TKI DI KABUPATEN CIREBON AGAR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJALIN KERJASAMA DENGAN BERBAGAI INSTANSI TERKAIT, SEBAGAI LANGKAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA TKI.
- TINGGINYA MINAT MASYARAKAT YANG MENJADI TKI TIDAK SERTA MERTA DIKARENAKAN PERSOALAN KETERBATASAN KESEMPATAN KERJA MELAINKAN KARENA BERBAGAI FAKTOR SEPERTI EKONOMI DAN POLA PIKIR MASYARAKAT. DIPERLUKAN KERJASAMA SEMUA PIHAK UNTUK MENGUBAH POLA PIKIR DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN.
- PERLU MENJALIN KEMITRAAN DAN MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SECARA TERBUKA DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.
- PERLU MENDORONG DAN MEMBINA PUSAT-PUSAT PELATIHAN KETRAMPILAN AGAR MENINGKATKAN STANDAR KOMPETENSINYA DAN MENCIPTAKAN IKLIM DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI DAN MASYARAKAT PEKERJA YANG SEHAT.

BPPT

CATATAN :

- KEJADIAN TRAGIS MUSIBAH LONGSORNYA GUNUNG KUDA DI DESA CIPANAS KECAMATAN DUKUPUNTANG YANG MENELAN BEBERAPA KORBAN JIWA WARGA KABUPATEN CIREBON SUNGGUH SANGAT MEMILUKAN. PERISTIWA-PERISTIWA MUSIBAH SEPERTI INI SERING MENIMPA WARGA KITA DIBEBERAPA AKTIFITAS GALIAN C LAINNYA. KAMI KHAWATIR SEMUA ITU TERJADI AKIBAT KETELEDORAN BPPT DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN AKTIFITAS GALIAN C.
- DARI SEKIAN BANYAK PROGRAM DAN KEGIATAN BPPT DALAM KURUN WAKTU 2014 LALU, TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM YANG SEBENARNYA KURANG EFEKTIF DAN KURANG BERDAMPAK POSITIF TERHADAP INDIKATOR CAPAIAN KERJA. SALAH SATU CONTOHNYA ADALAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI YANG TIDAK BERDAMPAK PADA MASUKNYA INVESTOR DI KABUPATEN CIREBON.

REKOMENDASI :

- BPPT HENDAKNYA TIDAK CEROBOH DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN GALIAN C. MOHON AGAR DILAKUKAN KAJIAN LAPANGAN YANG MENDALAM DAN PENELITIAN YANG LEBIH CERMAT AGAR MUSIBAH-MUSIBAH SERUPA TIDAK TERUS BERULANG.
- BPPT DIMOHON LEBIH CERMAT LAGI DALAM MENYUSUN PROGRAM-PROGRAM DAN KEGIATAN-KEGIATAN TAHUNAN. PRIORITASKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG LANGSUNG

BERDAMPAK PADA PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KABUPATEN CIREBON.

DISBUDPARPORA

CATATAN :

- ADANYA KEGIATAN BUDAYA YANG TIDAK DIDUKUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB.CIREBON SEHINGGA KURANG BERKEMBANGNYA SENI DAN BUDAYA TERSEBUT.
- BELUM TERKELOLA DAN TERTATA DENGAN BAIK KAWASAN WISATA.
- KURANGNYA PERHATIAN PEMERINTAH KEPADA ATLET – ATLET POTENSIAL MENJADI PENYEBAB MENURUNNYA PRESTASI OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON.

REKOMENDASI :

- AGAR PEMERINTAH DAERAH BISA MENDUKUNG KEGIATAN SENI & BUDAYA BAIK DALAM PENYEDIAAN KEGIATAN DAN JUGA ANGGARANNYA.
- DIPERLUKAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN SITUS-SITUS BERSEJARAH DAN KAWASAN WISATA SEBAGAI POTENSI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
- MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ATLET KABUPATEN CIREBON SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN DAN PEMACU SEMANGAT AGAR LEBIH BERPRESTASI.
- PERLU PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN ATLET BERBAKAT BERDASARKAN CABANG OLAHRAGA PRIOROTAS DAERAH.

- MELAKUKAN KAJIAN DAN PERENCANAAN PEMBUATAN MONUMEN ATAU BANGUNAN KHAS KABUPATEN CIREBON YANG SESUAI DENGAN KULTUR DAN BUDAYA MASYARAKAT CIREBON.
- MENJADIKAN RAPAT PARIPURNA PERINGATAN HARIJADI KABUPATEN CIREBON SEBAGAI PUNCAK KEGIATAN GUNA MENJAGA KESAKRALAN PERINGATAN HARIJADI KABUPATEN CIREBON.

DISPERINDAG

CATATAN :

- PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR MASIH SANGAT MINIM SEKALI, PADAHAL ITU DAPAT MENINGKATKAN PAD KITA, YANG DEMIKIAN INI DISEBABKAN KARENA KURANG OPTIMALNYA PENATAAN PEGAWAI PASAR.
- PENATAAN PASAR BATIK YANG TERKAIT DENGAN TEMPAT PARKIR DAN PEDAGANG ASONGAN MASIH BELUM TERSENTUH, SEHINGGA MASIH TERLIHAT ACAK-ACAKAN PADAHAL PASAR BATIK BUKAN SAJA MERUPAKAN SENTRA EKONOMI, TAPI JUGA BERPERAN SEBAGAI OBYEK WISATA.

REKOMENDASI :

- OPTIMALKAN RETRIBUSI PASAR DENGAN MEMINIMALISIR PUNGUTAN-PUNGUTAN LIAR.
- BENAHI SEGERA SENTRA PASAR BATIK SEBELUM MENJADI TAMBAH RUMIT DIKEMUDIAN HARI.

KESBANGLINMAS DAN SATPOL PP

CATATAN :

- BERAGAMNYA ORMAS YANG ADA DAN MUNCULNYA ORMAS-ORMAS BARU ADALAH SESUATU YANG POSITIF DALAM ALAM DEMOKRASI DEWASA INI, TAPI KETIDAKFAHAMAN MEREKA TERHADAP UNDANG-UNDANG KEORGANISASIAN DAPAT MEMUNCULKAN PROBLEM YANG SERIUS.
- CUKUP BANYAK PERATURAN-PERATURAN DAERAH YANG SUDAH DISAHKAN OELH DPRD TETAPI TIDAK OPTIMAL PADA TATARAN IMPLEMENTASINYA.

REKOMENDASI :

- KESBANGLINMAS HARUS KREATIF DAN INOFATIF DALAM MENYEBARKAN INFORMASI DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN KEORGANISASIAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN AGAR TERCIPTA SINERGITAS PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.
- SATPOL PP HARUS BERANI MENINDAK TEGAS DAN ARIF TERHADAP PELANGGAR PERATURAN-PERATURAN DAERAH DEMI TERJAGANYA KEWIBAWAAN PEMERINTAH DAERAH KAB. CIREBON.

INSPEKTORAT

CATATAN :

- TERHADAP LHP YANG BERUPA TEMUAN-TEMUAN, INSPEKTORAT TERKESAN EWEUH PAKEUWUH DALAM MENYAMPAIKAN KEPADA PEMBINA KEPEGAWAIAN

- TERDAPAT BENTUK-BENTUK TEMUAN YANG TERUS BERULANG DARI TAHUN KE TAHUN, PADAHAL ADA SATU PEPATAH YANG MENGATAKAN BAHWA "SEBODOH-BODOH ORANG ADALAH ORANG YANG JATUH TERPELOSOK DUA KALI DALAM SATU LOBANG YANG SAMA".
- BANYAK TEMUAN-TEMUAN YANG DITINDAKLANJUTI.

REKOMENDASI :

- INSPEKTORAT HARUS LEBIH TEGAS DAN BERANI DALAM MENYAMPAIKAN TEMUAN-TEMUANYA KEPADA PEMBINA KEPEGAWAIAN AGAR KESALAHAN YANG SAMA TIDAK TERUS BERULANG.
- TINGKATKAN PENGAWASAN SECARA OBJEKTIF , TRANSFARAN DAN LAKUKAN BIMBINGAN YANG INTENSIF KEPADA DESA-DESA DI KABUPATEN CIREBON MENGINGAT BESARNYA ALOKASI DANA DESA DARI BERBAGAI SUMBER DIMASA YANG AKAN DATANG.
- INSPEKTORAT AGAR MEMBERIKAN PRESURE KEPADA OBJEK PEMERIKSAAN AGAR TEMUAN-TEMUAN YANG DIPEROLEH DAPAT DITINDAKLANJUTI DAN TIDAK MEMBIARKAN TEMUAN ITU TETAP JADI TEMUAN. HAL INI PENTING UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI, TERTIB HUKUM DAN TERTIB KEUANGAN.

DISPENDA

CATATAN :

- ADANYA TEMUAN BPK YANG CUKUP SIGNIFIKAN TERKAIT DENGAN PAJAK REKLAME, MEMBUKTIKAN ADA SESUATU YANG KELIRU YANG DIALKUKAN OLEH DISPENDA. TENTUNYA

TEMUAN-TEMUAN ITU MENJADI PELAJARAN BERHARGA BAGI KITA SEMUA.

REKOMENDASI :

- TERKAIT DENGAN TEMUAN –TEMUAN BPK DIATAS , DISPENDA HARUS SEGERA MENINDAKLANJUTI DENGAN MELAKUKAN PEMBENAHAN SECARA SERIUS AGAR HAL YANG SAMA TIDAK TERJADI LAGI PADA PEMERIKSAAN BERIKUTNYA.
- PERLU SEGERA MENYIAPKAN PERUBAHAN REGULASI YANG DISESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN DEWASA INI.

BKPPD

CATATAN :

- ROTASI, MUTASI DAN PROMOSI JABATAN ADALAH SESUATU YANG WAJAR BAHKAN HARUS DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DALAM RANGKA UPAYA MENCIPTAKAN CLEAN AND GOOFGOVERNANCE. HAL ITU BISA DICAPAI SEPANJANG DILAKUKAN ATAS DASAR PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN. KAMI PANSUS I MENGAPRESIASI SETINGGI TINGGINYA TERHADAP UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARA BUPATI TERKAIT DENGAN MUTASI, ROTASI DAN PROMOSI JABATAN DILINGKLUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON HINGGA SAMPAI KELAPIS BAWAH. SEMOGA SEMUA ITU MEMBAWA MANFAAT DAN PERBAIKAN DI KABUPATEN CIREBON. AKAN TETAPI KARENA SERINGNYA MUTASI, ROTASI DAN PROMOSI JABATAN YAG DILAKUKAN OLEH SAUDARA BUPATI, MAKA MUNCULLAH KERESAHAN-KERESAHAN, INKONDUSIFITAS KERJA, LAHIRNYA WAS-WAS DALAM BEKERJA TERLEBIH-

LEBIH MUTASI TERSEBUT DILAKUKAN DILUAR PROFESIONALITAS DIRINYA.

REKOMENDASI :

- ROTASI, MUTASI DAN PROMOSI JABATAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN KOMPETENSI BIDANG, KOMPETENSI MANAJERIAL DAN KOMPETENSI SOSIAL SERTA SESEGERA MUNGKIN MEMBUAT REGULASI TERKAIT DENGAN ROTASI DAN MUTASI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATURAN YANG BERLAKU.
- MEMPERTIMBANGKAN JANGKA WAKTU ROTASI DAN MUTASI SUPAYA JANGAN TERKESAN TERLALU SERING DILAKUKAN.
- ROTASI DAN MUTASI DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN DIK DAN DUK. BKPPD HARUS MENGUTAMAKAN DIK BARU KEMUDIAN DUK.
- KEBERADAAN BAPERJAKAT HARAP DIBERDAYAKAN DENGAN OPTIMAL, SUPAYA TIDAK MENIMBULKAN KESAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BAHWA BAPERJAKAT CUMA SEKEDAR SIMBOL TETAPI TIDAK BERFUNGSI.

BKP5K

CATATAN DAN REKOMENDASI :

- BANYAK DESA-DESA YANG DINYATAKAN RAWAN PANGAN, AKAN TETAPI BELUM TERSENTUH PENYULUHAN. OLEH KARENA ITU KAMI MEREKOMENDASIKAN KEPADA SAUDARA BUPATI AGAR BKP5K LEBIH INTENSIF MELAKUKAN PENYULUHAN-PENYULUHAN PERTANIAN DAN KEGIATAN TERSEBUT TIDAK HANYA DILAKUKAN PADA SAAT GAPOKTAN MENDAPATKAN BANTUAN SAJA.

PENANAMAN TEMBAKAU. SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA BAHWA LAHAN, IKLIM DAN CUACA DI KABUPATEN CIREBON SANGAT TIDAK COCOK UNTUK PERTANIAN TEMBAKAU. SUNGGUH IRONIS BILA DIANTARA PROGRAM DISTANBUNNAKHUT TERDAPAT PROGRAM PENANAMAN TEMBAKAU YANG PADA AKHIRNYA SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIREALISASIKAN.

REKOMENDASI :

- DISTANBUNNAKHUT HARUS CERMAT DAN TELITI DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN ALIH FUNGSI LAHAN.
- DISTANBUNNAKHUT HARAP CERMAT DAN TELITI DALAM MENYUSUN RENCANA-RENCANA KERJA DAN PROGRAM-PROGRAM TAHUNAN YANG LEBIH KONGKRIT DAN RILL SEHINGGA DAPAT TERJANGKAU DAN TEREALISIR DENGAN BAIK.

BAGIAN PEREKONOMIAN/BPR/PDAM

CATATAN :

- TELAH DITEMUKAN DILAPANGAN ADANYA BEBERAPA BPR YANG KONDISINYA HIDUP ENGGAN MATI TAK MAU DAN KONDISI SEPERTI ITU TERABAIKAN BEGITU SAJA HINGGA SAAT INI TANPA SOLUSI.
- AGAK BOSAN SESUNGGUHNYA BILA KITA MENDENGAR KELUHAN KERUGIAN PDAM YANG PADAHAL TERUS SAJA DILAKUKAN PENYERTAAN MODAL OLEH KITA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON. NAMUN DISISI LAIN, KITA

JUMPAI PEMAKLUM YANG MEMBUAT KITA TERPAKSA MENERIMA KEADAAN, YAKNI PDAM BUKANLAH PERUSAHAAN YANG FIGUR BISNIS ANSIH, TETAPI DISAMPING BISNIS TERSELIP KEPENTINGAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEBUTUHAN PRIMER YANG CALON PELANGGANNYA BERDERET PANJANG SEBANYAK TIGA RIBU (3.000) CALON PELANGGAN YANG MASUK DALAM DAFTAR WAITING LIST.

REKOMENDASI :

- BAGIAN PEREKONOMIAN HENDAKNYA TELITI MENGAMATI KONDISI BPR-BPR YANG LA YAHYA WALA YAMUUT UNTUK DICARIKAN SOLUSI PEMULIHANNYA, BAIK MELALUI MARGER ANTAR BPR MAUPUN SOLUSI-SOLUSI LAINNYA.
- KEBOCORAN-KEBOCORAN AIR PAM DAN RUSAKNYA METER AIR ADALAH PENYEBAB SIGNIFIKAN ATAS KERUGIAN YANG MENIMPA PDAM, LAKUKAN PEMBENAHAN TERKAIT DUA HAL TERSEBUT DENGAN SEGERA.
- SEGERA LAKUKAN KERJASAMA DENGAN PDAM KABUPATEN KUNINGAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KETERSEDIAAN AIR BAKU UNTUK MENANGGULANGI WAITING LIST YANG BERDERET PANJANG.
- OH..... PDAM..... DO'A KAMI SELALU MENYERTAIMU.... SEMOGA ENGKAU SEGERA JAYA DAN MERAUP KEUNTUNGAN YANG BISA MENYUMBANGKAN PAD KABUPATEN CIREBON.

2. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BERDASARKAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN, MAKA DPRD MEREKOMENDASIKAN :

- PERLU DIADAKAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN TERHADAP PETUGAS PERBENDAHARAA APBN PADA SETIAP OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.
- PERENCANAA KINERJA DAN ANGGARAN PERLU DILAKUKAN SECARA CERMAT DAN REVISI ANGGARAN DAN KEGIATAN DILAKUKAN SECARA SELEKTIF SEHINGGA TIDAK MENGHAMBAT PELAKSANAAN KEGIATAN
- PERLU ADANYA PELATIHAN DAN PEMBINAAN SECARA KONTINYU TERHADAP SUMBER DAYA MANUSIA DI OPD-OPD AGAR PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN APA YANG DIHARAPKAN
- MENINGKATKAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK TERKAIT BAIK TINGKAT DAERAH, PROPINSI MAUPUN DENGAN PEMERINTAH PUSAT

3. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BERDASARKAN PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN, MAKA DPRD MEREKOMENDASIKAN :

- PERTAMA, TERKAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL, AGAR PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN HUBUNGAN KOORDINASI DIMAKSUD KHUSUSNYA DENGAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KONFLIK HORIZONTAL DITENGAH MASYARAKAT KITA, ATAUPUN PENANGANAN AKSI

UNJUK RASA DENGAN MENGEDEPANKAN PENDEKATAN-PENDEKATAN PERSUASIF.

- KEDUA, TERKAIT PEMBINAAN BATAS WILAYAH, KHUSUSNYA PENANGANAN BATAS WILAYAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DENGAN DAERAH TETANGGA, AGAR BISA DITEMUKAN SOLUSI TERBAIK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU
- KETIGA, TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA, AGAR KIRANYA PEMERINTAH DAERAH JUGA BERKONSENTRASI TERHADAP UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN BENCANA KHUSUSNYA BENCANA ALAM, ANTARA LAIN DENGAN PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI REBOISASI, ATAUPUN PEMBERIAN AMDAL

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI (LKPJ) TAHUN 2014 SECARA UMUM MERUPAKAN BAGIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON DENGAN DPRD.
2. DINAMIKA PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN BERKEMBANG SANGAT CEPAT DAN MEMBUTUHKAN PENGELOLAAN YANG PROFESIONAL
3. KUALITAS SDM APARATUR PEMERINTAH DAERAH HARUS DITINGKATKAN DAN DISESUAIKAN DENGAN DINAMIKA PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN SAAT INI, DALAM KESEMPATAN INI KAMI JUGA MEMINTA KETEGASAN BUPATI

AGAR KEPALA OPD YANG KINERJANYA KURANG BAIK SESUAI DENGAN HASIL AUDIT BPK DIREKOMENDASIKAN AGAR DIGANTIKAN DENGAN PAJABAT YANG LEBIH KOMPETEN DAN MEMILIKI KAPASITAS YANG LEBIH BAIK.

4. TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP KEMAJUAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KHUSUSNYA DI KABUPATEN CIREBON HARUS DISIKAPI SECARA SERIUS DENGAN MENGEDEPANKAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR MASING-MASING OPD KIRANYA DAPAT DIRENCANAKAN SECARA TERPADU DAN DIARAHKAN UNTUK MENDORONG POTENSI DAERAH SEHINGGA MEMBUKA AKSES PELUANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT.
5. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MASIH BELUM OPTIMAL SEHINGGA DIMASA YANG AKAN DATANG HARUS BISA LEBIH BAIK, BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA KETERBATASAN ANGGARAN HENDAKNYA TIDAK MENJADI KENDALA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DALAM MENCAPAI VISI DAN MISI YANG DICANANGKAN BUPATI. DINAS HARUS BERPERAN AKTIF DALAM MENJEMPUT DAN MEMANFAATKAN BANTUAN DARI PROVINSI MAUPUN DARI PUSAT.
6. DIHARAPKAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS/INSTANSI TERKAIT DAPAT MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS YANG BERUPA SARAN, MASUKAN DARI PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN CIREBON SEBAGAI HASIL DARI PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TAHUN 2014.

D. PENUTUP

DEMIKIAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN CIREBON TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2014, SEBAGAI BAHAN UNTUK PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI MASA MENDATANG.

Sumber, April 2015

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Cirebon

Ketua

H. MUSTOFA, SH

Wakil Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD
Hj. YUNINGSIH, MSi	Drs. H. SUBHAN	SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE.